

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI INDONESIA TAHUN 1990-2018**

SKRIPSI

Oleh:

SUNDARI RAHMA SARI PUTRI

NIM: 51.15.3.122

Program Studi

EKONOMI ISLAM



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2019 M/1441 H**

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI INDONESIA TAHUN 1990-2018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Islam**

Oleh:

SUNDARI RAHMA SARI PUTRI

NIM: 51.15.3.122

**Program Studi
EKONOMI ISLAM**



**PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUMATERA UTARA
MEDAN
TAHUN 2019 M/1441 H**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN
PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT
KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1990-2018**

Oleh:

Sundari Rahma Sari Putri

NIM: 51153122

Dapat Disetujui Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Islam

Medan, 18 November 2019

Pembimbing I:

Pembimbing II:

Dr. Nurlaila, S.E, MA.

NIP. 19750521201122002

Muhammad Syahbudi, MA

NIB. 1100000094

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Islam

Dr. Marliyah, M.Ag

NIP. 19760126 200312 2 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, PENGANGGURAN, DAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA TAHUN 1990-2018” a.n. Sundari Rahma Sari Putri, NIM. 51153122 Program Studi Ekonomi Islam telah di munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada tanggal 23 Oktober 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada program studi Ekonomi Islam.

Medan 18 November 2019
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Ekonomi Islam UINSU

Ketua

Sekretaris

Dr. Marliyah, M.Ag
NIP.197601262003122003

Imsar, M.Si
NIP.198703032045031004

Anggota

1. **Dr. Nurlaila, S.E, MA.**
NIP. 19750521201122002

2. **Muhammad Syahbudi, MA**
NIB. 1100000094

3. **Dr. Aliyuddin Abdul Rasyid, MA**
NIP.196506282003021001

4. **Imsar, M.Si**
NIP.198703032045031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Dr. Andri Soemitra, M.A
NIP. 1976 0507 200604 1 002

ABSTRAK

Sundari Rahma Sari Putri (2019). NIM:51153122. Judul Skripsi: “**Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1990-2018**”. Di bawah bimbingan, pembimbing I Ibu Dr. Nurlaila, SE, M.A dan pembimbing II Bapak Muhammad Syahbudi, M.A.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia. Salah satu akar permasalahan kemiskinan adalah pertambahan jumlah penduduk yang besar. Tingginya jumlah penduduk akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang sama cepatnya. Di lain pihak, kemampuan negara untuk menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Dengan demikian, jumlah pengangguran di Indonesia juga akan bertambah sehingga kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akan rendah dan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang yang berdampak pada pengurangan kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk (X_1), Pengangguran (X_2) dan Pengeluaran Pemerintah (X_3) terhadap tingkat Kemiskinan (Y) di Indonesia tahun 1990-2018. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pembuktian dari sebuah hipotesis. Pengumpulan data diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) dan *World Bank* dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 29 tahun. Analisis data regresi linear berganda melalui model OLS (*Ordinary Least Square*) menggunakan pengujian statistik *eviews 7*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada taraf signifikansi 5% secara parsial jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Pengangguran berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap tingkat kemiskinan serta pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hasil uji statistik secara bersama-sama (simultan) menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1990-2018.

Kata Kunci: *Jumlah Penduduk (X_1), Pengangguran (X_2), Pengeluaran Pemerintah (X_3), Kemiskinan (Y)*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat berangkaikan salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang aman dan sejahtera. Atas izin dan kehendak Allah SWT skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Skripsi ini berjudul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1990-2018” telah diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Dalam penulisan skripsi ini disadari begitu banyak ertolongan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak. Sebab tanpa aadanya pertolongan tersebut tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai dengan waktunya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada: Teruntuk yang paling istimewa kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda Sunaryo dan Ibunda Sri Rahmayani yang telah merawatku hingga dewasa, mendidikku, menyekolahkanku serta tiada henti dalam memberikan cinta, kasih sayang dan doa juga adik-adik tercinta Yohanda, Putri, Satria dan Teguh serta keluarga yang telah banyak membantu baik berupa dukungan materil maupun moril dan doa yang senantiasa menyertai penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Saidurrahman Harahap, M.Ag sebagai Rektor Universitas Negeri Sumatera Utara dan para wakil Rektor serta seluruh jajarannya.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara dan para Wakil Dekan serta seluruh jajarannya.

3. Ibu Dr. Marliyah, M.Ag dan Bapak Imsar, M.Si. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala kontribusi, bantuan dan bimbingannya selama ini.
4. Ibu Dr. Nurlaila, SE, M.A. selaku pembimbing skripsi I dan Bapak Muhammad Syahbudi, M.A selaku pembimbing skripsi II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, petunjuk dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Annio Indah Lestari Nst, M.Si selaku Penasehat Akademik yang turut berperan dalam membantu penulis untuk penulisan proposal skripsi.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara yang juga telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmunya untuk tiada bosannya mendidik penulis selama bangku perkuliahan serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk keluarga besar EKI-F angkatan 2015 yang telah bersama-sama menuntut ilmu di bangku perkuliahan, angkatan kita yang terhebat semoga semuanya tidak terlupakan dan menjadi kenangan yang indah untuk dikenang nanti.
8. Teruntuk wadah biru Universal Islamic Economic (UIE) UINSU yang telah menjadi tempat berproses selama di bangku perkuliahan. Semoga selalu menjadi wadah ilmu yang banyak memberi manfaat bagi seluruh ummat.
9. Kepada sahabat terbaik Melia Zulfa yang telah memberikan support, doa dan semangat dari awal perkuliahan hingga selesai semoga selalu dalam lindungan Allah SWT.
10. Dan untuk yang istimewa kepada semua pihak lainnya yang tidak bisa semuanya dituliskan dalam kata pengantar teramat singkat ini. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan pahala yang tiada pernah kering sampai kapan pun.

Penulis telah berupaya dengan sekuat tenaga dalam menyelesaikan skripsi ini, namun disadari masih terdapat banyak kekurangan yang kiranya dari sisi isi dan tata bahasanya. Sembari itu, penulis juga meminta kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Pada akhir kalimat ini

penulis menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya dan berharap apa yang ada dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Allahumma Aamii.

Medan, 18 November 2019

Penyusun

Sundari Rahma Sari Putri

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II: KAJIAN TEORI.....	11
A. Kajian Teori.....	11
1. Kemiskinan	11
a. Definisi Kemiskinan.....	11
b. Teori Lingkaran Perangkat Kemiskinan.....	12
c. Macam-macam Kemiskinan.....	14
d. Faktor-Faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin	15
e. Kemiskinan dalam perspektif Islam.....	15
2. Jumlah Penduduk	19
a. Definisi Jumlah Penduduk	19
b. Rasio Ketergantungan Penduduk	20
c. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penduduk.....	22

d.	Teori yang berhubungan dengan jumlah penduduk	22
e.	Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan	25
f.	Kependudukan dalam Islam	26
3.	Pengangguran.....	31
a.	Definisi Pengangguran	31
b.	Faktor-Faktor yang menyebabkan pengangguran	32
c.	Jenis-jenis Pengangguran	33
d.	Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan	34
e.	Pengangguran dalam pandangan Islam	35
4.	Pengeluaran Pemerintah.....	40
a.	Defenisi Pengeluaran Pemerintah	40
b.	Teori Pengeluaran Pemerintah	40
c.	Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah.....	42
d.	Faktor-Faktor penentu Pengeluaran Pemerintah	44
e.	Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan.....	45
f.	Pengeluaran Pemerintah dalam perspektif Islam	46
B.	Penelitian Terdahulu	47
C.	Kerangka Berpikir	53
D.	Hipotesis Penelitian.....	54
BAB III:	METODE PENELITIAN.....	55
A.	Pendekatan Penelitian	55
B.	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	55
C.	Populasi dan Sampel	55
D.	Data Penelitian	56
E.	Teknik Pengumpulan Data	56
F.	Definisi Operasional Variabel	57
G.	Teknik Analisis Data	58

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	63
A. Deskripsi Data Penelitian.....	63
1. Deskripsi Kemiskinan di Indonesia.....	63
2. Deskripsi Jumlah Penduduk di Indonesia	64
3. Deskripsi Pengangguran di Indonesia	65
4. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia	66
B. Uji Asumsi Klasik	67
1. Uji Normalitas	68
2. Uji Linearitas	68
3. Uji Multikolinearitas	69
4. Uji Autokorelasi	70
5. Uji Heterokedastisitas	70
6. Hasil Estimasi.....	71
a. Regresi OLS (<i>Ordinary Least Square</i>).....	71
C. Uji Statistik.....	73
1. Uji Simultan (Uji Statistik F)	73
2. Uji Parsial (Uji Statistik t).....	74
3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	75
D. Pembahasan Hasil Penelitian	76
BAB V: PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1990-2018	2
Tabel 2.1: Penelitian Terdahulu	47
Tabel 4.1: Uji Normalitas	68
Tabel 4.2: Uji Linearitas.....	69
Tabel 4.3: Uji Multikolinearitas.....	69
Tabel 4.4: Uji Autokorelasi	70
Tabel 4.5: Uji Heteroskedastisitas	71
Tabel 4.6: Hasil Regresi.....	72
Tabel 4.7: Hasil Uji Statistik F	74
Tabel 4.8: Hasil Uji Statistik t.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Lingkaran Perangkap Kemiskinan	13
Gambar 2.2: Kerangka Berpikir	53
Gambar 4.1: Grafik Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 1990-2018	62
Gambar 4.2: Grafik Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1990-2018	63
Gambar 4.3: Grafik Jumlah Pengangguran Indonesia Tahun 1990-2018	65
Gambar 4.4: Grafik Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1990-2018	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1990-2018	88
Lampiran 2: Hasil Pengolahan Data Uji Regresi Linear Berganda.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan dalam Pembangunan Ekonomi di setiap negara adalah mengentaskan masalah kemiskinan. Kemiskinan selalu menjadi persoalan fenomenal dalam bidang ekonomi yang menjadi titik acuan keberhasilan setiap pemerintah dalam pembangunan nasional di negaranya dari waktu ke waktu terlebih pada negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Menurut BPS (Badan Pusat Statistik) kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran¹.

Kesejahteraan memiliki hubungan negatif terhadap tingkat kemiskinan. Semakin rendah tingkat kemiskinan maka tingkat kesejahteraan penduduk akan tinggi dan semakin tinggi tingkat kemiskinan maka tingkat kesejahteraan penduduk akan semakin rendah. Jika tingkat kemiskinan di suatu negara tinggi maka keberhasilan pemerintah dalam pembangunan nasional juga semakin jauh dan dapat menyebabkan negara tersebut menjadi negara terbelakang. Sebagai salah satu tujuan pembangunan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat yaitu memajukan kesejahteraan umum, Indonesia menyadari bahwa memperhatikan masalah kemiskinan dan mengusahakan segala upaya untuk menekannya dalam agenda tahunan pemerintah sangatlah penting.

Masyarakat dikatakan sejahtera dan makmur apabila masyarakat tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Mengukur tingkat kemiskinan di berbagai negara merupakan salah satu yang sulit karena tingkat tersebut berbeda dari satu negara ke negara lain dan dari satu daerah ke daerah lainnya yang mencerminkan perbedaan kebutuhan-kebutuhan psikologis, sosial, dan ekonomi dari setiap orang, apalagi jika mereka berasal dari negara yang berbeda. Oleh karena itu, Para ahli ekonomi cenderung membuat perkiraan-

¹ <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html> #subjek View Tab1 diakses pada Selasa 8 Januari 2019 Pukul 17:41 WIB

perkiraan yang serba konservatif atau sederhana tentang kemiskinan dunia dalam rangka menghindari perkiraan-perkiraan yang berlebihan. Perkiraan itu sendiri didasarkan pada metodologi umum yang sudah populer dengan sebutan *Garis Kemiskinan Internasional*.²

Banyak dampak yang terjadi akibat tingginya tingkat kemiskinan di suatu negara diantaranya dapat menyebabkan tindak kriminal, pengangguran, gangguan kesehatan, kekacauan sosial, politik dan lain sebagainya. Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, pemerintah telah melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan demi tercapainya kesejahteraan umum mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, keterampilan masyarakat, keamanan dan sebagainya namun hal ini masih saja belum dapat mengurangi tingkat kemiskinan secara baik. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS dan World Bank di bawah ini menunjukkan perkembangan kemiskinan, jumlah penduduk, jumlah pengangguran dan pengeluaran pemerintah di Indonesia dalam periode tahun 1990-2017.

Tabel 1.1 Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1990-2018

Tahun	Jumlah Penduduk	Pengangguran	Pengeluaran Pemerintah	Kemiskinan
	(Jiwa)	(Jiwa)	(Rp)	(Jiwa)
1990	181,436,821	1,911,800	18,649,100,000,000	27,740,000
1991	184,615,979	1,992,115	20,784,600,000,000	26,300,000
1992	187,766,086	2,136,021	24,731,300,000,000	25,900,000
1993	190,879,523	2,199,210	29,756,700,000,000	23,700,000
1994	193,945,272	3,636,932	31,014,000,000,000	22,500,000
1995	196,957,849	3,800,000	35,584,200,000,000	32,600,000
1996	199,914,831	4,275,414	40,299,200,000,000	34,010,000
1997	202,826,465	4,183,971	42,952,000,000,000	38,700,000
1998	205,715,544	5,045,260	54,415,900,000,000	49,500,000
1999	208,612,556	6,030,319	72,631,300,000,000	47,970,000
2000	211,540,429	5,813,231	90,779,700,000,000	38,740,000
2001	214,506,502	8,005,031	113,416,100,000,000	37,870,000

² Michel P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 67

2002	217,508,059	9,132,104	132,218,800,000,000	38,390,000
2003	220,545,214	9,939,301	163,701,400,000,000	37,340,000
2004	223,614,649	10,251,351	191,055,626,000,000	36,150,000
2005	226,712,730	10,854,254	224,980,540,000,000	35,100,000
2006	229,838,202	11,104,693	288,079,870,000,000	39,300,000
2007	232,989,141	10,547,917	329,760,103,000,000	37,170,000
2008	236,159,276	9,427,590	416,866,669,000,000	34,960,000
2009	239,340,478	9,258,964	537,588,828,000,000	32,530,000
2010	242,524,123	8,592,490	618,177,992,000,000	31,020,000
2011	245,707,511	8,379,882	709,450,776,000,000	30,020,000
2012	248,883,232	7,757,831	796,848,275,918,420	29,130,000
2013	252,032,263	7,240,897	908,574,301,386,380	28,070,000
2014	255,131,116	7,147,069	996,197,442,903,830	28,280,000
2015	258,162,113	7,454,767	1,123,749,877,140,690	28,590,000
2016	261,115,456	7,024,172	1,181,613,139,392,340	28,010,000
2017	263,991,379	7,005,262	1,234,554,340,604,290	27,770,000
2018	267,663,435	6,871,264	1,332,534,472,426,250	25,950,000

Sumber: BPS dan World Bank, 2019

Data yang dipublikasikan BPS dalam tabel 1.1 menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1990-1994 mengalami penurunan sebesar 5.240.000 jiwa yaitu dari 27.740.000 pada tahun 1990 menjadi 22.500.000 pada tahun 1994. Namun, akibat terjadinya krisis moneter yang terjadi memberikan dampak bagi perekonomian Indonesia sehingga pada tahun 1995-1999 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 15.370.000 jiwa yaitu pada tahun 1995 jumlah penduduk miskin sebesar 32.600.000 jiwa menjadi 49.500.000 jiwa pada tahun 1999. Pada tahun 2000-2018 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan dari 38.740.000 jiwa pada tahun 2000 menjadi 25.950.000 jiwa pada tahun 2018. Penurunan jumlah penduduk miskin ini sudah lebih sedikit dari jumlah penduduk miskin pada tahun 1990 dan dapat dikatakan usaha pemerintah dalam menekan angka kemiskinan tersebut sudah cukup baik.

Diantara penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi diantara tahun 2000-2018, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yaitu sebesar 39.300.000 jiwa. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin setelah masa krisis yang dimulai dari tahun 2000-2018 telah

mengalami penurunan akan tetapi penurunannya belum terlalu besar. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesempatan, rendahnya kemampuan, kurangnya jaminan serta ketidakberdayaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan dengan meningkatkan taraf hidupnya ke arah yang lebih baik lagi.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di negara berkembang adalah pertambahan jumlah penduduk yang sangat besar. Hal ini menimbulkan beberapa masalah pada usaha-usaha pembangunan karena pertambahan jumlah penduduk yang tinggi akan menimbulkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang hampir sama cepatnya. Di lain pihak, kemampuan negara itu menciptakan kesempatan kerja yang baru sangat terbatas. Sebagai akibat dari kedua keadaan yang bertentangan itu, pertambahan penduduk menimbulkan masalah-masalah berikut: (i) jumlah pengangguran yang sudah cukup serius keadaannya sesudah perang dunia ke II semakin bertambah serius lagi; (ii) perpindahan penduduk dari daerah pedesaan ke kota menjadi bertambah pesat dan menjadi masalah urbanisasi yang berlebihan; (iii) pengangguran di kota-kota besar terus-menerus bertambah; dan (iv) keadaan kemiskinan di negara berkembang semakin serius³.

Jumlah penduduk di Indonesia yang dipublikasikan oleh World Bank terlihat pada tabel 1.1 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 181.436.821 jiwa meningkat menjadi 226.712.730 jiwa pada tahun 2005 sampai tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia juga semakin meningkat menjadi 267,663,435 jiwa. Keadaan ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang selalu meningkat dengan kondisi tingkat kemiskinan yang cenderung menurun dan meningkat di beberapa tahun tertentu, tidak mutlak menjadi penyebab timbulnya masalah kemiskinan jika sumber daya manusia yang banyak ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai faktor produksi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat diseimbangkan dengan jumlah lapangan kerja.

Permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah penduduk adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan

³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 75

kerja. Sehingga, terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. *Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.*⁴ Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya.

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Jika tidak maka akan terjadi pengangguran dan berdampak buruk dengan berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemakmuran yang berimbas kepada kemiskinan. Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.⁵

Terlihat dalam tabel 1.1 bahwa jumlah pengangguran di Indonesia tahun 1990-2018 yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan dua kondisi yaitu; pertama, dari tahun 1990-2006 jumlah pengangguran mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 1.911.800 jiwa pada tahun 1990 menjadi 11.104.693 jiwa pada tahun 2006. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi kemiskinan yang menurun pada tahun 1990-1994 dari 27.740.000 jiwa menjadi 22.500.000 jiwa. Kedua, jumlah pengangguran mengalami penurunan yang di mulai dari tahun 2007 sejumlah 10.547.917 jiwa hingga menjadi 7.005.262 jiwa pada tahun 2017 dan kembali menurun pada tahun 2018 menjadi 6,871,264 jiwa. Namun, penurunan ini tidak lebih sedikit dibandingkan pada tahun 1990 yang hanya sebesar 1.911.800 jiwa. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi.

Tingginya jumlah penduduk di Indonesia dengan tidak diikutinya ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menambah masalah pembangunan di negara berkembang untuk

⁴ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm 13.

⁵ *Ibid.*, hlm.14

mengentaskan kemiskinan yaitu pengangguran. Menurut Todaro dan Smith Pertumbuhan jumlah penduduk yang pada akhirnya dihubungkan dengan kenaikan angkatan kerja, secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Jika angkatan kerja yang tersedia dalam jumlah yang lebih besar, berarti tersedia juga lebih banyak pekerja yang produktif dan jumlah penduduk yang besar akan meningkatkan ukuran potensial pasar domestik.⁶ Tetapi, mayoritas penduduk negara-negara dunia ketiga saat ini kurang terdidik, kurang pengalaman, dan kurang cakap apabila dibandingkan dengan penduduk negara-negara yang sekarang maju pada awal pertumbuhan ekonominya.⁷

Permasalahan pembangunan yang terjadi menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan permasalahan kemiskinan dapat diatasi. Campur tangan pemerintah yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah yang menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal selain pajak. Faktor penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang tujuannya untuk mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.⁸

Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan.⁹ Maka, dari hal ini dapat diketahui bahwa instrumen kebijakan fiskal pemerintah melalui Pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap pengurangan kemiskinan yaitu jika pengeluaran pemerintah tinggi diharapkan

⁶ Michel P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, hlm 119.

⁷ *Ibid.*, hlm 89.

⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori Pengantar*, hlm 168.

⁹ *Ibid.*, hlm 331.

dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh World Bank mengenai jumlah pengeluaran pemerintah Indonesia setiap tahunnya mulai dari tahun 1990-2017 selalu mengalami peningkatan. Pengeluaran ini tentunya digunakan oleh pemerintah pada setiap periodenya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan yang berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah pengeluaran pemerintah yang di publikasikan oleh World Bank dari tahun ke tahun selama periode 1990-2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.18.649.100.000.000 hingga mencapai Rp.1.332.534.472.426.250 pada tahun 2018. Bertambahnya jumlah pengeluaran pemerintah yang diikuti dengan bertambahnya jumlah pengangguran sehingga akan berdampak pada pembentukan kemiskinan dalam beberapa periode tahun yang ditunjukkan pada tabel 1.1, menggambarkan bahwa masih belum efektifnya alokasi pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal. Namun, jumlah pengangguran yang mulai menurun pada tiga tahun terakhir pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa usaha pemerintah sudah membawa hasil yang cukup baik dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penulis merasa penting untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1990-2018.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

Dampak yang terjadi akibat tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia diantaranya dapat menyebabkan tindak kriminal, pengangguran, gangguan kesehatan, kekacauan sosial, politik dan lain sebagainya.

1. Pada tahun 1995-1999 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 15.370.000 jiwa
2. Diantara penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi diantara tahun 2000-2017, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yaitu sebesar 39.300.000 jiwa.
3. tahun 1990-2006 jumlah pengangguran mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 1.911.800 jiwa pada tahun 1990 menjadi 11.104.693 jiwa pada tahun 2006. Hal ini bertolak belakang dengan kondisi kemiskinan yang menurun pada tahun 1990-1994 dari 27.740.000 jiwa menjadi 22.500.000 jiwa.
4. Bertambahnya jumlah pengeluaran pemerintah yang diikuti dengan bertambahnya jumlah pengangguran yang akan berdampak pada pembentukan kemiskinan menggambarkan bahwa masih belum efektifnya alokasi pengeluaran pemerintah sebagai salah satu instrumen kebijakan fiskal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang ditemukan, maka penelitian terkait kemiskinan ini dibatasi pada faktor permasalahan jumlah penduduk, tingkat pengangguran, dan pengeluaran pemerintah yang berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memperjelas permasalahan yang ingin diteliti agar lebih fokus dan mendalam. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data selama 29 tahun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
2. Apakah jumlah pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
3. Apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?
4. Apakah jumlah penduduk, jumlah pengangguran, dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia;
2. Mengetahui pengaruh jumlah pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia;
3. Mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia;
4. Mengetahui pengaruh jumlah penduduk, jumlah pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk ilmu pengetahuan tentang masalah pembangunan di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya
- c. Sebagai salah satu sumber informasi tentang permasalahan perkembangan kemiskinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk berlatih dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai tambahan untuk memperoleh gambaran mengenai jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan kemiskinan serta melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini
- b. Sebagai tambahan referensi bagi pemerintahan yang terkait dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian lebih untuk mengatasi masalah kemiskinan.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan menurut Shirazi dan Pramanik adalah suatu situasi yang dihadapi oleh seorang individu dimana mereka tidak memiliki kecukupan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang nyaman, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun dimensi spiritual.¹⁰

Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.¹¹ Dari sisi makanan, BPS menggunakan indikator yang direkomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu kebutuhan gizi 2.100 kalori per orang per hari, sedangkan dari sisi kebutuhan non makanan tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Model ini pada intinya membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan suatu garis kemiskinan (GK), yaitu jumlah rupiah untuk konsumsi per orang per bulan. World Bank membagi dimensi kemiskinan kedalam empat hal pokok, yaitu *lack of opportunity*, *low capabilities*, *low level security*, dan *low capacity*. Kemiskinan dikaitkan juga dengan keterbatasan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik sehingga menyebabkan kerentanan, keterpurukan, dan ketidak berdayaan.¹²

¹⁰ Irfan Syauqi, dkk, *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi. I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 68.

¹¹ <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> diakses pada Selasa 8 Januari 2019 Pukul 17:41 WIB

¹² Mohd. Kurniawan. PD, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lilin)," dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, No. 01, Vol. 08, April 2017, Palembang, 2017, hlm. 16.

b. Teori Lingkaran Perangkap Kemiskinan

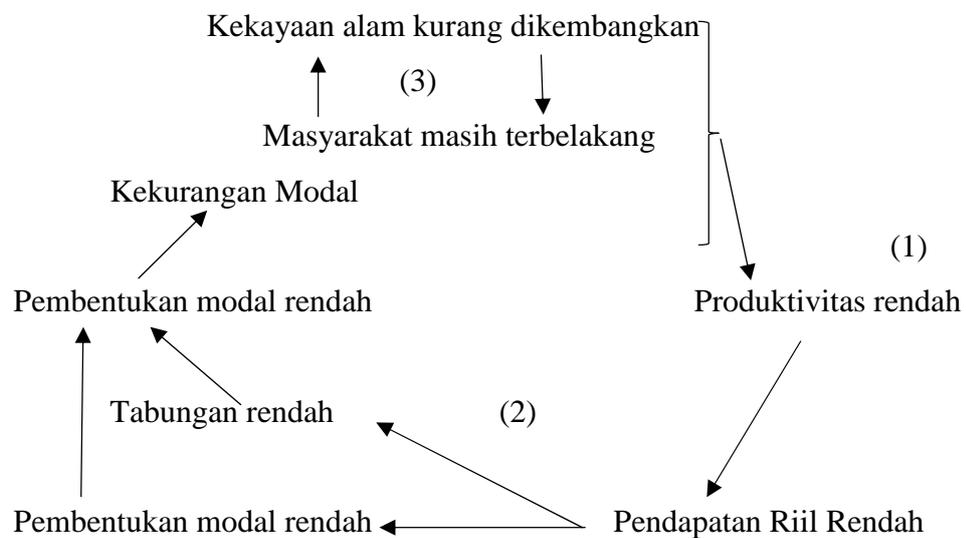
Lingkaran Perangkap Kemiskinan adalah serangkaian kekuatan yang selain mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Teori ini terutama dikaitkan kepada nama Nurkse, seorang ahli ekonomi yang merintis penelaahan mengenai masalah pembentukan modal di negara berkembang. Nurkse berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa mendatang. Menurut Nurkse, terdapat 2 jenis lingkaran perangkap kemiskinan yang menghalangi negara berkembang mencapai tingkat pembangunan yang pesat : *dari segi penawaran modal dan dari segi permintaan modal*.¹³ Tiga Bentuk Perangkap Kemiskinan antara lain:

- 1) Dari segi penawaran modal lingkaran perangkap kemiskinan dapat dinyatakan secara berikut. Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah, yang diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung juga rendah. Ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal yang rendah. Keadaan yang terakhir ini selanjutnya akan dapat menyebabkan suatu negara menghadapi kekurangan barang modal dan dengan demikian tingkat produktivitas akan tetap rendah.
- 2) Dari segi permintaan modal, corak lingkaran perangkap kemiskinan mempunyai bentuk yang berbeda. Di negara-negara miskin perangsang untuk melaksanakan penanaman modal rendah karena luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas, dan hal yang belakangan disebutkan ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah yang diwujudkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu.
- 3) Meier dan Baldwin mengemukakan pula satu lingkaran perangkap kemiskinan lain. Lingkaran perangkap kemiskinan ini timbul dari hubungan

¹³ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, (Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 113.

saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang belum dikembangkan. Untuk mengembangkan kekayaan alam yang dimiliki, harus ada tenaga kerja yang mempunyai keahlian untuk memimpin dan melaksanakan berbagai macam kegiatan ekonomi.

Ketiga lingkaran perangkat kemiskinan di atas dapat digambarkan secara berikut:¹⁴



Gambar: 2.1 Lingkaran Perangkat Kemiskinan

Foster dkk, memperkenalkan tiga indikator untuk mengukur kemiskinan yaitu:¹⁵

- 1) *The incidence of Poverty* yaitu presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi per kapita di bawah garis kemiskinan.
- 2) *The dept of Poverty* menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK), atau dikenal dengan sebutan *Poverty Gap Index*. Indeks ini mengestimasi jarak/perbedaan rata-

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁵ Tulus Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 96-97.

rata pendapatan orang miskin dan garis kemiskinan sebagai suatu proporsi dari garis tersebut.

- 3) *The severity of Poverty* yang diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Indeks ini pada prinsipnya sama dengan IJK. Namun, selain mengukur jarak yang memisahkan orang miskin dari garis kemiskinan, IKK juga mengukur ketimpangan diantara penduduk miskin atau penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Indeks ini juga disebut dengan *distributionally sensitive index* dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.¹⁶

c. Macam-macam Kemiskinan

Ada tiga macam kemiskinan diantaranya:¹⁷

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah kemiskinan dengan pendekatan yang diidentifikasi banyaknya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu, dimana diperhitungkan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara, standar minimal antar negara berbeda dengan negara lain.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan Relatif yaitu pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Dengan kata lain, kemiskinan relatif berkaitan dengan permasalahan distribusi pendapatan.¹⁸ Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan jika tingkat hidup masyarakatnya berubah.

3) Kemiskinan Struktural

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

¹⁷ Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 227.

¹⁸ *Ibid.*

Kemiskinan Struktural adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat dibawah suatu sistem pemerintahan yang menyebabkan mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk Miskin

Banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan. Penyebab kemiskinan dari segi ekonomi adalah:

- 1) Kemiskinan secara makro lahir karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, adanya sekelompok orang yang memonopoli kepemilikan atas sumber daya dapat mengakibatkan munculnya kemiskinan.
- 2) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, hal ini terlihat bahwa kekurangan orang miskin untuk maju adalah karena mereka tidak memiliki keilmuan, pengetahuan dan keahlian seperti yang dimiliki oleh orang yang kaya.
- 3) Kemiskinan muncul sebagai akibat perbedaan akses dalam modal, hal ini yang sering kali menjadi ketakutan orang apabila hendak berwirausaha yaitu keterbatasan modal, sementara di sisi lain ada sekelompok orang yang mampu memiliki akses terhadap sumber-sumber permodalan yang ada.¹⁹

Selain itu Todaro menambahkan tinggi rendahnya tingkat kemiskinan suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu (i) Tingkat pendapatan nasional dan (ii) Lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.²⁰

e. Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

¹⁹Mudrajad Kuncoro, *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 80.

²⁰ Michel P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hlm. 66.

1) Makna fakir menurut bahasa

Kata fakir menunjukkan kepada seseorang yang memiliki sedikit atau tidak memiliki harta sama sekali. Menurut bahasa, kata *faqrun*, maknanya adalah hal yang lepas dari segala sesuatu, baik bagian dari anggota tubuhnya ataupun yang lainnya.²¹

Ibnu faris berkata; “*fa, qaf* dan *ra* merupakan huruf asli dan shahih yang menandakan pada hal yang lepas dari sesuatu, baik itu dari bagian anggota tubuh ataupun yang lainnya. Jadi, *faqir* adalah patah tulang-tulang punggungnya. Para ahli bahasa berkata; kata *faqir* diambil dari kata *faqrun*, seakan-akan orang fakir adalah orang yang patah tulang karena tergelincir dari kehinaan dan kemiskinannya.²²

2) Makna miskin menurut bahasa

Kata miskin asal katanya adalah *as-sakan*, artinya yaitu lawan kata dari hal yang selalu bergolak dan bergerak. Ibnu Faris berkata; “Huruf *Sin, kaf* dan *nun* adalah huruf asli dan umum menandakan pada suatu makna kebaikan dari hal yang bergerak dan bergejolak, seperti dikatakan, *sakana asy-syai’u yaskunu sukunan sakinan*.²³

Sehingga bisa diartikan orang miskin adalah orang yang ditenangkan oleh kefakiran dan ia adalah orang yang sama sekali tidak memiliki sesuatu yang tidak mencukupi kebutuhannya. Seorang dikatakan miskin, dikarenakan kondisi dan situasinya benar-benar telah membuat gerakannya menjadi sedikit lalu mencegahnya untuk bergerak, atau bisa juga berarti orang-orang yang berdiam diri di rumah saja dan enggan pergi meminta-minta kepada manusia.

3) Cara Penanggulangan Kemiskinan dalam Al-Qur’an Dan Hadis

²¹ Mahmud Ahmad Sa’id Al-Athrasy, *Hikmah di Balik Kemiskinan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 9.

²² Ibnu Faris, *Mu’jam Maqayis al- Lughah*, Juz 4, Cet. Ke-1 (Beirut: Dar al-Jail, 1420 H/1999 M), hlm. 444.

²³ *Ibid.*, hlm 46.

Pada dasarnya Islam tidak mentolerir segala bentuk kemiskinan bagi ara pemeluknya. Islam memerintahkan dengan tegas supaya umatnya menyalurkan hartanya dengan cara berinfak, berzakat, membiayai peperangan itu sendiri, diperintahkan untuk menjalankan haji dan sebagainya. Secara tersurat perintah ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan dan memiliki harta. Hal ini seperti yang tertuang di dalam ayat 60 surat Al-Anfal yang berbunyi:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ

Artinya: “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambah untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan)”. (Qs. Al-Anfal(8):60).²⁴

Ayat tersebut secara tegas menjelaskan bahwa setiap mukmin itu harus memiliki harta dalam bentuk apapun sebagai kekuatan bagi mereka untuk menghadapi musuh-musuh Allah SWT dan musuh-musuh mereka. Selain itu, setiap harta yang dimiliki tersebut akan menjadi investasi yang baik bagi diri setiap mukmin dan tidak akan dirugikan sedikitpun jika harta yang dimiliki dipergunakan untuk menolong agama Allah SWT dan salah satunya adalah untuk mengentaskan kemiskinan di muka bumi ini. Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, Al-Qur'an menganjurkan banyak cara yang harus di tempuh, yang secara garis besar dapat dibagi pada tiga hal pokok:

a) Kewajiban setiap individu

Kerja dan usaha merupakan cara pertama dan utama yang ditekankan oleh kitab suci Al-Qur'an, karena hal inilah yang sejalan dengan naluri manusia, sekaligus juga merupakan kehormatan dan harga dirinya. Dalam Qs. Ali-Imran ayat-14 disebutkan bahwa:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ الدِّسَاءِ وَالْبَيْتِينَ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقَنْطَرَةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

²⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sukses Publing, 2012), hlm. 185.

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik (surga).” (Qs. Al-Imran(3):14).²⁵

Ayat ini secara tegas menggarisbawahi dua naluri manusia, yaitu naluri seksual yang dilukiskan sebagai “kesenangan kepada syahwat wanita” (lawan jens), dan naluri kepemilikan yang dipahami dari ungkapan (kesenangan) kepada “harta yang banyak”.

Kalau demikian, kerja dan usaha merupakan dasar utama dalam memperoleh kecukupan dan kelebihan. Sedang mengharapkan usaha orang lain untuk keperluan itu, lahir dari adat kebiasaan dan di luar naluri manusia. Memang, lanjut Ibnu Khaldun, kebiasaan dapat membawa manusia jauh dari hakikat kemanusiaannya.

b) Kewajiban Masyarakat

Dalam hal ini, al-Quran walaupun menganjurkan sumbangan sukarela dan menekankan keinsafan pribadi, namun dalam beberapa hal kitab suci ini menekankan hak dan kewajiban, baik melalui kewajiban zakat, yang merupakan hak delapan kelompok yang ditetapkan dalam surat at-Taubah ayat 60, maupun melalui sedekah wajib yang merupakan hak bagi yang meminta atau yang tidak, namun membutuhkan bantuan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Dzariyat (51): 19 yang berbunyi:

كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dalam harta mereka ada hak untuk (orang miskin yang meminta) dan yang tidak berkecukupan (walaupun tidak meminta).” (Q. S. Al-Dzariyat (51): 19).²⁶

Hak dan kewajiban tersebut mempunyai kekuatan tersendiri, karena keduanya dapat melahirkan “paksaan” kepada yang berkewajiban untuk

²⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 52.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 522.

melaksanakannya. Bukan hanya paksaan dari lubuk hatinya, tetapi juga atas dasar bahwa pemerintah dapat tampil memaksakan pelaksanaan kewajiban tersebut untuk diserahkan kepada pemilik haknya.

Muhammad Arif dalam bukunya yang berjudul *Filsafat Ekonomi Islam* menuliskan bahwa; Islam menyuruh kaum kaya dan berharta menunaikan zakat dan memberikannya kepada kaum miskin, kerabat, anak yatim dan mereka yang memerlukan. Islam meletakkan fondasi persaudaraan, persahabatan dan cinta di antara seluruh umat muslim. Dengan membantu si miskin, maka si kaya tidak hanya melaksanakan kewajiban agamanya melainkan juga dapat belajar bersyukur, mencintai, dan berkasih sayang. Jadi, zakat dan sedekah melicinkan jalan bagi terwujudnya solidaritas nasional dan keterpaduan sosial dengan cara merekatkan persaudaraan antara si kaya dan si miskin.²⁷

c) Kewajiban pemerintah

Pemerintah juga berkewajiban mencukupi setiap kebutuhan warga negara, melalui sumber-sumber dana yang sah. Yang terpenting di antaranya adalah pajak, baik dalam bentuk pajak perorangan, tanah, atau perdagangan, maupun pajak tambahan lainnya yang ditetapkan pemerintah bila sumber-sumber tersebut di atas belum mencukupi.²⁸

2. Jumlah Penduduk

a. Defenisi Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan unsur yang penting dalam kegiatan ekonomi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, dan tenaga usahawan yang diperlukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi, sebagai akibat dari beberapa fungsi ini maka penduduk merupakan unsur menciptakan dan mengembangkan tehknologi penggunaan berbagai faktor produksi.²⁹

Badan Pusat Statistik (BPS) menjabarkan bahwa penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan

²⁷ Muhammad Arif, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Buku Ajar: Medan, 2018). Hlm.45

²⁸ Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis*, Juz 3, hlm. 88.

²⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, hlm 32.

untuk menetap.³⁰ Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk.³¹

Menurut Malthus pada mulanya ketika rasio di antara faktor produksi lain dengan penduduk/tenaga kerja adalah relatif tinggi yang berarti penduduk relatif sedikit apabila dibandingkan dengan faktor produksi lain, penambahan penduduk akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat begitu juga sebaliknya.³²

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk disuatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dari pada waktu sebelumnya. Pertambahan penduduk yang cepat menimbulkan masalah yang serius bagi kesejahteraan dan bagi pembangunan, oleh karena itu besarnya jumlah penduduk jika tidak diimbangi oleh dukungan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan berbagai masalah seperti kemiskinan dan ketidakstabilannya kondisi nasional secara keseluruhan. Untuk itu, upaya penekanan pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun perlu dilaksanakan untuk penyediaan sarana dan prasarana serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat terlaksana serta dengan pengurangan jumlah penduduk merupakan salah satu langkah penting dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

b. Rasio Ketergantungan Penduduk

Bonus demografi atau sering juga disebut dengan istilah *demographic dividend* atau *demographic gift*, dapat diartikan sebagai keuntungan ekonomis

³⁰<https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html> diakses pada Jumat 11 Januari 2019 Pukul 18:24 WIB

³¹ Mulyadi S, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, (Jakarta: ESIS, 2007), hlm 15.

³² Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm 23.

yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil dari proses penurunan fertilitas jangka panjang³³.

Rasio ketergantungan Penduduk adalah perbandingan antara penduduk usia non produktif yaitu usia 0-14 tahun dan 65+ tahun dengan penduduk usia produktif 15-64 tahun. Semakin rendah nilai rasio beban tanggungan semakin baik beban tanggungan penduduk.³⁴ Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Secara umum, di negara sedang berkembang mempunyai angka beban tanggungan yang tinggi akibat besarnya jumlah penduduk usia muda. Kondisi ini tidak menguntungkan bagi pembangunan ekonomi karena³⁵:

- 1) Penduduk golongan usia muda, cenderung untuk memperkecil angka penghasilan per kapita dan mereka semua merupakan konsumen dan bukan sebagai produsen dalam perekonomian tersebut.
- 2) Adanya golongan penduduk usia muda yang besar jumlahnya di suatu negara berakibat pada alokasi faktor-faktor produksi ke arah investasi sosial, dan bukan ke investasi modal. Akibatnya, di negara sedang berkembang pertumbuhan ekonomi cenderung lambat.

³³ Adioetomo, Sri Moetiningih Setyo, *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Ekonomi*, (Jakarta: Presentasi dalam Pentaloka BKKBN, 2011), hlm 23.

³⁴ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 39.

³⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 79

c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk suatu negara di pengaruhi oleh tiga hal pokok, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi.³⁶ Masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) *Fertilitas* (kelahiran), merupakan kemampuan seorang perempuan atau sekelompok perempuan secara rill untuk melahirkan atau hasil reproduksi nyata dari seorang perempuan serta sebuah tindakan reproduksi yang menghasilkan kelahiran hidup. Fertilitas atau kelahiran merupakan salah satu faktor penambah jumlah penduduk disamping migrasi masuk.
- 2) *Mortalitas* (kematian), merupakan salah satu diantara tiga komponen demografi yang dapat mempengaruhi perubahan penduduk. Ukuran kematian menunjukkan suatu angka yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan tinggi rendahnya kematian suatu penduduk dalam suatu negara.
- 3) *Migrasi*, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Migrasi dapat mengubah pandangan dan perilaku orang, menambah keterampilan dan membuat seseorang lebih mempunyai inovasi sedangkan dampak negatifnya adalah apabila pertumbuhan proporsi penduduk kota lebih tinggi dari laju pertumbuhan industrilisasi dan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan kesempatan kerja.

d. Teori yang Berhubungan dengan Jumlah Penduduk

Ada dua pandangan yang berbeda mengenai pengaruh penduduk pada pembangunan:

- 1) Pertama, adalah pandangan pesimistis yang berpendapat bahwa penduduk (pertumbuhan penduduk yang pesat) dapat menghantarkan dan mendorong pengurasan sumberdaya, kekurangan tabungan, kerusakan lingkungan, kehancuran ekologis, yang kemudian dapat memunculkan masalah-masalah sosial, seperti kemiskinan, keterbelakangan dan kelaparan.
- 2) Kedua adalah pandangan optimis yang berpendapat bahwa penduduk adalah aset yang memungkinkan untuk mendorong pengembangan ekonomi dan

³⁶ Mulyadi Subri, *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, hlm 41.

prolusi inovasi teknologi dan institusional sehingga dapat mendorong perbaikan kondisi sosial. Di kalangan para pakar pembangunan telah ada konsensus bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tinggi tidak hanya berdampak buruk terhadap supply bahan pangan, namun juga semakin membuat kendala bagi pengembangan tabungan, cadangan devisa, dan sumberdaya manusia.³⁷

3) Teori Malthus

Malthus menjelaskan kecenderungan umum penduduk suatu negara untuk tumbuh menurut deret ukur yaitu menjadi dua kali lipat setiap 30–40 tahun. Sementara itu, pada waktu yang bersamaan, karena hasil yang menurun dari tanah, persediaan pangan hanya tumbuh menurut deret hitung. Oleh karena pertumbuhan persediaan pangan tidak bisa mengimbangi pertumbuhan penduduk yang sangat cepat dan tinggi, maka pendapatan per kapita akan cenderung turun menjadi sangat rendah, yang menyebabkan jumlah penduduk tidak pernah stabil, atau hanya sedikit di atas subsisten.³⁸

Dalam kenyataannya, produksi pangan dunia bukan berkurang, bahkan lebih dari cukup untuk memberi makanan seluruh populasi manusia di dunia. Pada bulan Mei tahun 1990, FAO (Food And Agricultural Organization) mengumumkan hasil studinya bahwa produksi pangan dunia ternyata mengalami surplus 10% untuk dapat mencukupi seluruh populasi penduduk dunia. Ketidacukupan barang dan jasa bukan disebabkan jumlah populasi yang terlalu banyak atau kurangnya produksi pangan, tetapi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi barang dan jasa. Ideologi kapitalisme dipaksa oleh Barat (negara-negara penjajah) untuk menguasai duniatermasuk Dunia Ketiga (Dunia Islam). Hal ini dibuktikan dengan 80% barang dan jasa dunia dinikmati oleh negara-negara kapitalis yang jumlah penduduknya hanya sekitar 25% penduduk dunia.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm 4.

³⁸ Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: STIE YKPN, 1997). hlm 45.

³⁹ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, (Buku Ajar: Medan, 2019), Hlm. 170

4) Menurut Jhon Stuart Mill

Jhon Stuart Mill seorang ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris dapat menerima pendapat Malthus mengenai laju pertumbuhan penduduk melampaui laju pertumbuhan makanan sebagai suatu aksioma, namun demikian Jhon Stuart Mill berpendapat bahwa pada suatu manusia dapat mempengaruhi perilaku demografinya, jika produktivitas seseorang tinggi maka terdapat kecenderungan memiliki keluarga kecil (fertilitas rendah). Mill menyanggah bahwa kemiskinan tidak dapat dihindarkan akibat pengaruh pertumbuhan penduduk, jika suatu waktu wilayah terjadi kekurangan bahan makanan, maka keadaan tersebut hanyalah bersifat sementara dan dapat ditanggulangi dengan mengimpor makanan atau memindahkan penduduk ke daerah lain. Jhon Stuart Mill menyarankan peningkatan pendidikan sehingga penduduk lebih rasional sehingga mempertimbangkan perlu tidaknya menambah jumlah anak sesuai dengan karier dan usaha yang ada.⁴⁰

Ada tiga alasan yang menyebabkan pertumbuhan penduduk yang tinggi akan memperlambat pembangunan:⁴¹

- 1) Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempersulit pilihan antara meningkatkan konsumsi saat ini dan investasi yang dibutuhkan untuk membuat konsumsi dimasa mendatang semakin tinggi.
- 2) Banyak negara yang penduduknya masih sangat tergantung pada sektor pertanian, pertumbuhan penduduk mengancam keseimbangan antar sumber daya alam yang langka.
- 3) Pertumbuhan penduduk yang cepat membuat semakin sulit melakukan perubahan yang dibutuhkan untuk meningkatkan perubahan ekonomi dan sosial.

⁴⁰ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses masalah dan Dasar*, hlm. 14-15.

⁴¹ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN). hlm. 32.

e. Hubungan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan

Menurut Nelson dan Leibstein terdapat pengaruh langsung antara penambahan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.⁴²

Teori siklus populasi kemiskinan merupakan argumen utama dari para ekonom yang berpendapat bahwa pertumbuhan penduduk secara cepat menimbulkan berbagai konsekuensi ekonomi yang merugikan. Menurut teori Malthus pertumbuhan penduduk yang pesat pada suatu negara akan menyebabkan terjadinya kemiskinan kronis. Malthus melukiskan suatu kecenderungan universal bahwa jumlah populasi di suatu negara akan meningkat sangat cepat menurut deret ukur.⁴³ Sementara itu, karena adanya proses penambahan hasil yang semakin berkurang dari suatu faktor produksi yang jumlahnya tetap, yaitu tanah, maka persediaan pangan hanya akan meningkat menurut deret hitung. Karena pertumbuhan pengadaan pangan tidak dapat berpacu secara memadai atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk, maka pendapatan perkapita (dalam masyarakat agraris, pendapatan perkapita diartikan sebagai produksi pangan perkapita) cenderung terus mengalami penurunan sampai sedemikian rendahnya sehingga segenap populasi harus bertahan pada kondisi sedikit di atas tingkat subsisten.⁴⁴

Perkembangan penduduk yang tinggi selanjutnya menghambat negara berkembang untuk mencapai salah satu tujuan penting pembangunan ekonomi, yaitu pemerataan pendapatan.⁴⁵ Pertambahan penduduk yang tinggi akan

⁴² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*, Hlm.100

⁴³ Michel P. Todaro dan Stephen C. Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Hlm. 329-330

⁴⁴ *Ibid.*,

⁴⁵ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*, Hlm. 105-106

menyebabkan jurang yang sudah ada di antara beberapa golongan masyarakat menjadi bertambah lebar. *Pertama*, di satu pihak pengangguran yang terlalu besar jumlahnya cenderung untuk mempertahankan tingkat upah pekerja tidak terdidik pada tingkat upah yang sangat rendah. *Kedua*, penambahan penduduk di daerah pertanian menimbulkan pengangguran terselubung yang lebih serius dan keadaan ini akan menyebabkan pendapatan rata-rata petani miskin menjadi rendah. Pada waktu yang sama, karena perbandingan antara tanah dan penduduk telah bertambah kecil, maka sewa tanah akan mengalami kenaikan. Ini hanya akan menambah pendapatan para petani kaya. Dan *ketiga*, kekurangan kesempatan kerja di desa-desa memperderas arus urbanisasi kota-kota besar dan hal ini menimbulkan pertumbuhan kota yang terlalu cepat. Akibat lanjut dari keadaan ini harga tanah, rumah dan sew rumah naik dengan cepat.

f. Kependudukan dalam Islam

Pembatasan kelahiran penduduk dengan cara yang ditawarkan oleh Neo Malthusian tidak dibenarkan dalam Islam. Tidak boleh ada suatu undang-undang atau peraturan pemerintah yang membatasi jumlah anak dalam sebuah keluarga. Allah Swt mengecam orang yang tidak mau memperoleh keturunan (menggunakan pil pencegah kehamilan) dengan alasan: takut miskin, tidak dapat memberi makan, takut banyak anak, harus memberi tambahan belanja, ingin membatasi jumlah keturunan, takut mengganggu pekerjaan orang tua, takut tidak bisa mendidik, dan lain sebagainya sebagaimana yang diserukan oleh musuh-musuh Islam (QS. Al-Isra: 31). Rasulullah Saw bersabda: “Nikahilah wanita yang banyak anak lagi penyayang, karena sesungguhnya aku berlomba-lomba dalam banyak umat dengan umat-umat lain di hari kiamat (dalam riwayat lain: dengan para nabi di hari kiamat)”. Suatu umat membutuhkan jumlah yang banyak, yang akan menunjukkan kekuatannya. Mereka akan beribadah kepada Allah, dan Allah akan menjaga mereka dari tipu daya musuh-musuh mereka.⁴⁶

Islam mengharamkan pembunuhan janin dalam rahim, membuang rahim atau membuang sang istri tak bisa hamil seumur hidup. Termasuk sterilisasi

⁴⁶ Isnaini Harahap, *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, hlm.169

(vasektomi atau tubektomi), karena sama dengan abortus yang berakibat kemandulan. Nabi Muhammad Saw telah melarang pengebirian (al-ikhtisha') sebagai teknik untuk mencegah kehamilan secara permanen yang ada saat itu (Muttafaq 'alaih). International Planned Parenthood Federation (IPPF) tidak menganjurkan kepada negara-negara anggotanya termasuk Indonesia, untuk melaksanakan sterilisasi sebagai alat kontrasepsi. Keputusan Majma' Fiqh Islami di Kuwait (5/91988), mengharamkan untuk memutuskan kemampuan mempunyai anak bagi laki-laki dan perempuan (pemandulan: vasektomi dan tubektomi), tanpa adanya alasan darurat secara syar'i yaitu apabila membahayakan hidupnya karena suatu penyakit, atau bahkan bisa menyebabkan kematian.⁴⁷

Dari segi filosofi, teori Malthus yang mendasari program KB adalah bathil, karena tidak sesuai dengan kenyataan. Marx dan Engels tidak sependapat dengan yang menyatakan bahwa apabila tidak diadakan pembatasab terhadap pertumbuhan penduduk, maka manusia akan kekurangan bahan pangan. Menurut Marx tekanan penduduk di suatu negara bukannya tekanan penduduk terhadap bahan pangan, tetapi tekanan penduduk terhadap kesempatan kerja. Kaum kapitalis membeli mesin-mesin untuk menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Jadi penduduk yang melarat tidak disebabkan oleh kekurangan bahan makanan, karena kaum kapitalis mengambil sebagian pekerjaan mereka.⁴⁸

Jika dahulu Islam hanya dijadikan sebagai justifikasi (pembenaran) program pemerintah yang sedang menggalakkan KB, kali ini Islam harus berada di depan dan memelopori gagasan dan gerakan mengatasi persoalan ledakan penduduk bumi. Oleh sebab itu, perlu disadari bahwa pentingnya menggali pesan-pesan dasar yang terkandung di dalam Al-Qur'an dan hadis. Menurut Dr. Azhari Tarigan dalam konteks ajaran Islam ada dua hal yang dapat

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 170

dikembangkan; konsep kekhalifahan dan konsep *zurriyat* (generasi) yang kuat.⁴⁹ Kitab suci menegaskan bahwa manusia telah dipilih Allah sebagai khalifah (pemimpin) di samping sebagai *abd* (hamba).

Sebagai khalifah, manusia memiliki kewajiban dan tugas untuk memakmurkan bumi (*wasta'marakum al-ard*). Bukan hanya untuk manusia itu sendiri, tetapi juga makhluk lainnya seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan. Adapun sebagai abdi, manusia wajib mengabdikan dan menundukkan dirinya di depan Tuhan dengan cara melakukan ibadah kepada Allah SWT.⁵⁰ Di atas segalanya, manusia juga diberikan kebebasan untuk mengelola bumi sepanjang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Berdasarkan kebebasan itu pula manusia dipilih sebagai khalifah. Kemakmuran bumi hanya dapat diwujudkan oleh khalifah yang memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas.

Manusia dengan kemampuan berpikirnya mampu merumuskan kerja-kerja peradaban buat kesejahteraan manusia. Berbeda dengan materi alam lainnya, seperti gunung, bukit, bahkan bumi ini. Secara fisik mereka lebih besar, namun tidak memiliki kebebasan. Karenanya mereka tidak dapat menjadi khalifah di alam ini. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya: “Sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung dan bukit-bukit, namun mereka menolak untuk memikulnya karena merasa berat. Dan manusia memikulnya. Sungguh manusia itu zalim dan bodoh” (QS Al-Ahzab(33): 72).⁵¹

Ayat-ayat di dalam kitab suci menegaskan bahwa alam dan segala isinya diciptakan buat manusia, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 29, Allah swt berfirman yang berbunyi:

⁴⁹ Azhari Akmal Tarigan, *Etika Dan Spiritualitas Bisnis: Tela'ah isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*, (Cet. III; Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), hlm.153

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 428.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu”.(Qs Al-Baqarah (2): 29).⁵²

Manusia harus selalu “melihat ke atas,” hanya kepada Tuhan, kemudian kepada sesamanya harus melihat dalam garis mendatar dan kepada alam harus melihat ke bawah. Dalam perspektif kependudukan, manusia dalam posisinya sebagai khalifah harus mampu mengatur bumi agar menjadi tempat yang tetap layak huni bagi seluruh isinya. Manusia juga dituntut untuk menatanya, menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, kebutuhan hidupnya dengan kebutuhan pangan serta sumber daya alam yang tersedia. Intinya, manusia harus menjaga agar tidak terjadi apa yang oleh ahli demografi dan ahli lingkungan sebutkan dengan istilah *ecological suicide* (bunuh diri ekologi). Jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan buruknya kualitas lingkungan hidup itu sendiri. Konsep kedua yang ingin dikedepankan adalah, *zurriyat* (mempersiapkan generasi buat masa depan).⁵³ Di dalam Qs. An-Nisa ayat 9 Allah menegaskan:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar" (Qs. An-Nisa (4) :9).⁵⁴

Kata kunci ayat tersebut adalah anak-anak yang lemah (generasi yang tidak berdaya). Ayat ini dapat dipahami bahwa Allah melarang kita meninggalkan keturunan yang lemah baik dari sisi aqidah, ilmu, ekonomi, sosial-budaya dan teknologi. Generasi yang lemah adalah generasi yang tidak dapat mengembangkan potensi dirinya dan tidak mampu mengelola alam.

⁵² Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 6.

⁵³ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm.308

⁵⁴ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 79.

Mereka adalah generasi yang gagal menjalankan fungsi kekhalifahannya. Ayat di atas juga mengandung pesan, pentingnya memberi prioritas untuk meningkatkan kualitas generasi bukan kuantitasnya. Kita dapat berkata, Islam sesungguhnya lebih mendorong kita untuk memiliki keturunan yang berkualitas ketimbang keturunan yang kuantitasnya (jumlah) banyak. Kendati dalam satu riwayat, Nabi mengatakan bahwa ia bangga dengan umat yang banyak (*ana mukasirun bikum al-anbiya*). Namun hadis ini tetap harus dibaca dalam konteks kualitas.

Ibn Khaldun juga mengkaitkan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kali jumlah penduduk meningkat maka kuantitas kerja pun akan meningkat yang berakibat meningkatnya produksi. Sebaliknya setiap kali jumlah penduduk menurun akan menurun pulalah kuantitas kerja yang berakibat menurunnya produksi. Kata Ibn Khaldun:

“Tidakkah anda saksikan bahwa di tempat-tempat yang kurang penduduknya kesempatan kerja adalah sedikit atau tidak ada sama sekali, dan penghasilan rendah sebab sedikitnya kegiatan-kegiatan manusia. Sebaliknya kota-kota yang kebudayaannya lebih maju penduduknya lebih baik keadaannya dan makmur”.⁵⁵

Dengan demikian Ibn Khaldun menghargai kerja dan dampak ekonomisnya. Selain itu juga menekankan fungsi sosial dan moral kerja. Sebab masyarakat desa menurut Ibn Khaldun, yang banyak bekerja memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka mempunyai suatu keistimewaan, yaitu moral mereka yang kuat. Sementara masyarakat kota, yang hidup dalam kemewahan, kemalasan, kesantiaian, dan ketenggelaman dalam berbagai kelezatan hidup, moral mereka bobrok. Dengan demikian kerja menurut Ibn Khaldun merupakan katup pengaman moral. Sebab ketenggelaman dalam kemewahan tanpa kerja akan mengantarkan pada penyelewengan.⁵⁶

Program-program pengendalian pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi dengan kebijakan rekayasa kualitas, maka itu akan membuat kondisi bangsa ini semakin parah. Jumlah penduduknya sedikit, sumber daya

⁵⁵ Husen Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, hlm.309

⁵⁶<https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/pemikiran-ekonomi-ibnu-khaldun/> diakses pada Jum'at 1 Februari 2019, Pukul 17:23 WIB

manusianya juga rendah. Maka tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Kesimpulannya adalah kedudukan kita sebagai khalifah sejatinya harus bisa amanah menjalankan segala perintah Allah SWT dan tidak lupa semua itu harus berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis. Terutama yang harus menjadi perhatian adalah kondisi lingkungan yang bagaimanakah yang ingin kita siapkan buat anak cucu kita. Laporan yang diberikan beberapa media akhir-akhir ini tentang bahaya ledakan penduduk, seharusnya menyadarkan kita tentang perlunya untuk menata ulang bumi di mana kita hidup. Tidak saja untuk diri kita yang menjadi anak zamannya, tetapi juga buat mewariskannya bagi generasi mendatang.

3. Pengangguran

a. Definisi Pengangguran

Dalam standar pengertian yang sudah ditentukan secara internasional, yang dimaksud dengan pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.⁵⁷

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angka kerja (usia 15 tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya, seperti ibu rumah tangga, siswa sekolah SMP, SMA, mahasiswa perguruan tinggi dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

Hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke

⁵⁷ Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Modern*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 66-67.

atas. Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya. Karena kadangkala ada juga pekerja diperkotaan yang tidak bekerja secara sukarela karena mencari pekerjaan yang lebih baik dan yang lebih sesuai dengan tingkat pendidikannya. Mereka menolak pekerjaan-pekerjaan yang mereka rasakan lebih rendah dan mereka bersikap demikian karena mereka mempunyai sumber-sumber lain yang bisa membantu masalah keuangan mereka. Orang-orang seperti ini bisa disebut menganggur tetapi belum tentu miskin. Sama juga halnya seperti banyaknya individu yang mungkin bekerja secara penuh perhari, tetapi tetap memperoleh pendapatan yang sedikit. Banyak pekerja yang mandiri disektor informal yang bekerja secara penuh tetapi mereka masih tetap miskin.⁵⁸

b. Faktor-Faktor yang menyebabkan Pengangguran

Menurut Sadono Sukirno, efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.⁵⁹ Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatnya peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Apabila pengangguran disuatu negara sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Penyebab pengangguran dan kemiskinan adalah:

- 1) Pengangguran terjadi karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih sedikit dibanding pencari kerja.
- 2) Adanya persaingan untuk mendapatkan pekerjaan atau kompetensi pekerja tidak sesuai dengan lowongan di pasar kerja.

⁵⁸ Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE,1999), hlm. 25-26.

⁵⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, hlm 41.

- 3) Adanya Pemutusan Hubungan kerja (PHK) karena adanya krisis ekonomi di suatu daerah atau negara.

c. Jenis-Jenis Pengangguran

1) Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan penggolongan ini pengangguran dapat dibedakan kepada jenis pengangguran berikut:⁶⁰

a) Pengangguran Normal/Friksional

Pengangguran Normal/Friksional adalah terdapatnya pengangguran yang terjadi dalam suatu ekonomi sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja dimana ekonomi sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh.

b) Pengangguran Siklikal

Pengangguran Siklikal adalah pengangguran yang terjadi akibat menurunnya permintaan agregat yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya.

c) Pengangguran Struktural

Adalah pengangguran yang terjadi akibat dari perubahan struktur kegiatan ekonomi dalam suatu negara tertentu seperti wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi dan lain sebagainya.

d) Pengangguran Teknologi

Adalah pengangguran yang terjadi karena penggunaan mesin dan kemajuan teknologi sehingga terjadinya pergantian tenaga manusia dengan teknologi yang menyebabkan banyak pengurangan tenaga kerja.

2) Pengangguran Berdasarkan Cirinya

a) Pengangguran Terbuka

Adalah pengangguran yang tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja yang

⁶⁰ *Ibid.*, hlm 328-330.

mengakibatkan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan dalam suatu perekonomian.

b) Pengangguran Tersembunyi

Adalah kelebihan jumlah pekerja dalam suatu kegiatan perekonomian dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien.

c) Pengangguran Bermusim

Adalah pengangguran yang sering terjadi pada sektor pertanian dan perikanan dimana pekerjaan hanya dilakukan pada musim tertentu.

d) Setengah Menganggur

Adalah para pekerja yang belum memiliki pekerjaan tetap dan hanya bekerja pada paruh waktu tertentu.

d. Hubungan Pengangguran Terhadap Kemiskinan

Permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah penduduk adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja. Sehingga, terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Masyarakat yang berada di dalam kondisi tidak bekerja (menganggur) maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan di dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya.⁶¹ Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Jika tidak maka akan terjadi pengangguran dan berdampak buruk dengan berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemakmuran yang berimbas kepada kemiskinan.

Apabila keadaan pengangguran di suatu negara adalah sangat buruk, kekacauan politik dan sosial selalu berlaku dan menimbulkan efek yang buruk kepada kesejahteraan masyarakat serta prospek pembangunan ekonomi dalam

⁶¹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, hlm 13.

jangka panjang.⁶² Hubungan yang erat sekali antara tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.⁶³ Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh adalah orang kaya.

e. Pengangguran dalam pandangan Islam

Defenisi pengangguran sebagaimana yang ada dalam ekonomi konvensional yang membatasi penganggur hanya pada pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan adalah defenisi yang sangat sempit bila dilihat dari kaca mata ajaran Islam tentang kerja. Dalam perspektif Islam kerja (*'amal*) menyangkut segala aktifitas kegiatan manusia baik yang bersifat badaniah maupun rohaniah yang dimaksudkan untuk mewujudkan atau menambah suatu manfaat yang dibolehkan secara syar'i. Ketika seseorang tidak mau mempergunakan potensinya maka itulah pengangguran yang amat membahayakan diri dan masyarakatnya. Secara Moral Islam orang yang demikian adalah menganggur yang memikul dosa. Sedangkan yang terus memfungsikan potensinya baik modal, tenaga maupun pikirannya tidak termasuk kategori menganggur yang menyalahi ajaran Islam.⁶⁴ Ketika seseorang tidak bekerja namun ia masih terus berfikir keras bagaimanapun bisa memproduktifitaskan dirinya sehingga bisa menghasilkan kerja yang produktif maka ia secara moral Islam memenuhi kewajiban kerja dalam Islam dan tidak menanggung dosa pengangguran.

⁶² *Ibid.*, hlm.14

⁶³ Lincolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*, hlm. 25-26.

⁶⁴ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm 138.

Dalam sistem kenegaraan yang menerapkan syariah Islam, kepala negara (Khalifah) berkewajiban memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan sebagai realisasi Politik Ekonomi Islam. Rasulullah saw: “Khalifah adalah pemelihara urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya”. (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Lebih detail, Rasulullah saw. secara praktis senantiasa berupaya memberikan peluang kerja bagi rakyatnya. Suatu ketika Rasulullah memberikan dua dirham kepada seseorang. Kemudian beliau bersabda (yang artinya), “Makanlah dengan satu dirham, dan sisanya, belikanlah kapak, lalu gunakan kapak itu untuk bekerja”.

Mekanisme yang dilakukan oleh Khalifah dalam mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara garis besar dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu: mekanisme individu dan sosial ekonomi.

1) Mekanisme individu dalam Islam

Dalam mekanisme ini Khalifah secara langsung memberikan pemahaman kepada individu, terutama melalui sistem pendidikan, tentang wajibnya bekerja dan kedudukan orang-orang yang bekerja di hadapan Allah Swt. serta memberikan keterampilan dan modal bagi mereka yang membutuhkan. Islam pada dasarnya mewajibkan individu untuk bekerja dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup. Banyak nash al-Quran maupun as-Sunnah yang memberikan dorongan kepada individu untuk bekerja. Misalnya firman Allah SWT dalam surah Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

Berjalanlah kalian di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. (QS al-Mulk (67): 15).⁶⁵

Imam Ibnu Katsir menyatakan: Maksudnya, bepergianlah kalian semua ke daerah di bumi manapun yang kalian kehendaki, dan bertebaranlah di berbagai bagiannya untuk melakukan beraneka ragam pekerjaan dan perdagangan.⁶⁶

⁶⁵ Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hlm. 564.

Bahkan Rasulullah pernah mencium tangan Saad bin Muadz ra. tatkala beliau melihat bekas kerja pada tangannya, seraya bersabda (yang artinya), “Ini adalah dua tangan yang dicintai Allah Taala”.

Jelas, Islam mewajibkan kepada individu untuk bekerja. Ketika individu tidak bekerja baik karena malas, cacat, atau tidak memiliki keahlian dan modal untuk bekerja maka Khalifah berkewajiban untuk memaksa individu bekerja serta menyediakan sarana dan prasarananya, termasuk di dalamnya pendidikan. Hal ini pernah dilakukan Khalifah Umar ra. ketika mendengar jawaban orang-orang yang berdiam di masjid pada saat orang-orang sibuk bekerja bahwa mereka sedang bertawakal. Saat itu beliau berkata, “Kalian adalah orang-orang yang malas bekerja, padahal kalian tahu bahwa langit tidak akan menurunkan hujan emas dan perak”. Kemudian Umar ra. mengusir mereka dari masjid dan memberi mereka setakar biji-bijian.

2) Mekanisme sosial ekonomi dalam Islam

Mekanisme ini dilakukan oleh Khalifah melalui sistem dan kebijakan, baik kebijakan di bidang ekonomi maupun bidang sosial yang terkait dengan masalah pengangguran.⁶⁷

- a) Negara wajib menciptakan lapangan kerja agar setiap orang yang mampu bekerja dapat memperoleh pekerjaan. Rasulullah saw. bersabda: Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat); ia akan diminta pertanggungjawabannya atas urusan rakyatnya. (HR Al-Bukhari dan Muslim). Dalam bidang ekonomi kebijakan yang dilakukan Khalifah adalah meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil baik di bidang pertanian dan kehutanan, kelautan, dan tambang maupun meningkatkan volume perdagangan.
- b) Sebaliknya, pemerintah dapat mengambil tanah yang telah ditelantarkan selama tiga tahun oleh pemiliknya, seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. ketika berada di Madinah. Dalam sektor industri Khalifah

⁶⁶ Naf'an, *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, hlm. 141.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm 142.

akan mengembangkan industri alat-alat (industri penghasil mesin) sehingga akan mendorong tumbuhnya industri-industri lain.

- c) Di sektor kelautan dan kehutanan serta pertambangan, Khalifah sebagai wakil umat akan mengelola sektor ini sebagai milik umum dan tidak akan menyerahkan pengelolaannya kepada swasta. Selama ini ketiga sektor ini banyak diabaikan atau diserahkan kepada swasta sehingga belum optimal dalam menyerap tenaga kerja.
- d) Dalam iklim Investasi dan usaha, Khalifah akan menciptakan iklim yang merangsang untuk membuka usaha melalui birokrasi yang sederhana dan penghapusan pajak serta melindungi industri dari persaingan yang tidak sehat. Adapun dalam kebijakan sosial yang berhubungan dengan pengangguran, Khalifah tidak mewajibkan wanita untuk bekerja, apalagi dalam Islam, fungsi utama wanita adalah sebagai ibu dan manajer rumah tangga (*ummu wa rabbah al-bayt*). Kondisi ini akan menghilangkan persaingan antara tenaga kerja wanita dan laki-laki. Dengan kebijakan ini wanita kembali pada pekerjaan utamanya, bukan menjadi pengangguran. Sementara lapangan pekerjaan sebagian besar akan diisi oleh laki-laki kecuali sektor pekerjaan yang memang harus diisi oleh wanita.
- e) Negara menyediakan jaminan sosial berupa jasa pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Pendidikan, kesehatan, dan keamanan adalah kebutuhan asasi dan harus dikecap oleh manusia dalam hidupnya. Hal ini karena pemenuhan terhadap ketiganya termasuk masalah “pelayanan umum” dan kemaslahatan hidup terpenting. Islam telah menentukan bahwa yang bertanggung jawab menjamin tiga jenis kebutuhan dasar tersebut adalah negara.
- f) Negara harus berpihak kepada pengusaha maupun buruh secara adil. Hubungan ketenagakerjaan di dalam pandangan Islam adalah hubungan kemitraan yang harusnya saling menguntungkan. Tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja adalah kontrak kerjasama yang saling menguntungkan. Agar hubungan kemitraan tersebut dapat berjalan dengan baik dan semua pihak yang terlibat saling diuntungkan, maka Islam

mengaturnya secara jelas dan rinci dengan hukum-hukum yang berhubungan dengan ijarah al-ajir (kontrak kerja).

Menurut Islam, suatu transaksi ijarah yang akan dilakukan haruslah memenuhi prinsip-prinsip pokok transaksi ijarah. Prinsip-prinsip pokok transaksi menurut Islam adalah:⁶⁸

Pertama : Jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan yang haram.

Kedua : Memenuhi syarat sahnya transaksi ijarah, yakni:

1. Ajir dan musta'jir harus sudah mumayyiz, yakni sudah mampu membedakan baik dan buruk; tidak sah transaksi ijarah jika salah satu atau kedua pihak belum mumayyiz seperti anak kecil, orang yang lemah mental, orang gila, dan lain sebagainya.
2. Transaksi (akad) harus didasarkan pada keridhaan kedua pihak, tidak boleh ada unsur paksaan.

Ketiga : Transaksi (akad) ijarah haruslah memenuhi ketentuan dan aturan yang jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antar kedua pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi ijarah hal-hal yang harus jelas ketentuannya adalah menyangkut: (a) bentuk dan jenis pekerjaan; (b) masa kerja; (c) upah kerja; (d) tenaga yang dicurahkan saat bekerja. Dengan jelasnya dan rincinya ketentuan-ketentuan dalam transaksi ijarah al-ajir tersebut, maka diharapkan masing-masing pihak dapat memahami hak dan kewajiban mereka masing-masing.

Itulah mekanisme Islam yang Insya Allah bisa mengatasi pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan secara adil. Ini hanya akan terwujud jika sistem Islam diterapkan secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah Islamiyah.

4. Pengeluaran Pemerintah

a. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam APBN

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 145.

(Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk Nasional.⁶⁹ Faktor-faktor yang lebih penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan dalam jangka panjang.⁷⁰

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran pemerintah ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan.⁷¹

b. Teori Pengeluaran Pemerintah

Teori tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dapat dianalisis dengan model pembangunan dari Rostow dan Musgrave, hukum Wagner tentang perkembangan aktivitas pemerintah dan teori Peacock dan Wiseman. Teori-teori tersebut dilatarbelakangi oleh perkembangan pengeluaran pemerintah yang selalu meningkat akibat kegiatan pemerintah yang mengalami peningkatan dalam sistem perekonomian. Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator bagi kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pemerintah itu sendiri. Namun demikian, proporsi dari pengeluaran pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah suatu ukuran yang sangat kasar terhadap kegiatan pemerintah dalam suatu bentuk perekonomian.

1) Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi tiga yaitu antara tahap awal,

⁶⁹ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, hlm. 168.

⁷⁰ *Ibid.*

⁷¹ Aan Jaelani. "Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017," *Munich Personal RePeC Archive Paper* No. 77423, Maret 2017, Cirebon 2017, hlm 3

tahap menengah, dan tahap lanjut; (i) Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi. (ii) Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. (iii) Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.⁷²

2) Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.⁷³

3) Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran

⁷² Ferry Prasetya, *Kebijakan Publik: Pengeluaran Pemerintah*, (Modul, tidak diterbitkan), hlm 2.

⁷³ *Ibid.*,

pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.⁷⁴

c. Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah dapat diklasifikasikan melalui berbagai jenis, seperti yang dingkapkan oleh Mangkoesoebroto, Budiono, Supramoko, dan Dumairy.⁷⁵

Menurut Mangkoesoebroto, pengeluaran pemerintah terdiri atas:

- 1) Pengeluaran Rutin yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pemeliharaan dan penyelenggaraan pemerintah yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang, subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah dapat menjalankan misinya dalam rangka menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintah, kegiatan operasional dan pemeliharaan aset negara.
- 2) Pengeluaran Pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana maupun non prasarana yang dilaksanakan dalam periode tertentu.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm 3.

⁷⁵ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, hlm. 177.

Pengeluaran pemerintah menurut Boediono ada tiga pos utama pada sisi pengeluaran yaitu:

- 1) Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
- 2) Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawainya.
- 3) Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payments).

Pengeluaran pemerintah, menurut Supramoko dapat dinilai dari berbagai segi, sehingga dapat dibedakan menjadi:

- 1) Pengeluaran merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang.
- 2) Pengeluaran memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat.
- 3) Merupakan penghematan pengeluaran yang akan datang.
- 4) Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Pengeluaran pemerintah di Indonesia, menurut Dumairy dapat dibedakan menurut dua klasifikasi, yaitu:

- 1) Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk pemeliharaan atau penyelenggaraan roda pemerintahan sehari-hari meliputi: belanja pegawai; belanja barang; berbagai macam subsidi (subsidi daerah dan subsidi harga barang); angsuran dan bunga utang pemerintah; serta jumlah pengeluaran lain.
- 2) Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana dan non prasarana. Dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi.

d. Faktor-Faktor Penentu Pengeluaran Pemerintah

Jumlah pengeluaran pemerintah yang akan dilakukan dalam suatu periode tertentu tergantung kepada banyak faktor. Yang penting diantaranya

adalah : jumlah pajak yang akan diterima, tujuan-tujuan kegiatan ekonomi jangka pendek dan pembangunan ekonomi jangka panjang, dan pertimbangan politik dan keamanan.⁷⁶

a Proyeksi jumlah pajak yang diterima

Salah satu faktor penting yang menentukan besarnya pengeluaran pemerintah adalah jumlah pajak yang diramalkan. Dalam menyusun anggaran belanjanya pemerintah harus terlebih dahulu membuat proyeksi mengenai jumlah pajak yang akan diterimanya. Makin banyak jumlah pajak yang dikumpulkan, makin banyak pula perbelanjaan pemerintah yang akan dilakukan.

b Tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai

Pemerintah penting sekali peranannya dalam perekonomian. Kegiatannya dapat memanipulasi/mengatur kegiatan ekonomi ke arah yang diinginkan. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut seringkali pemerintah membelanjakan uang yang lebih besar dari pendapatan yang diperoleh melalui pajak.

c Pertimbangan Politik dan Keamanan

Kestabilan negara selalu menjadi salah satu tujuan penting dalam menyusun anggaran belanja pemerintah. Kekacauan politik, perselisihan diantara berbagai golongan masyarakat dan daerah sering berlaku di berbagai negara di dunia. Keadaan seperti itu akan menyebabkan kenaikan perbelanjaan pemerintah yang sangat besar, terutama apabila operasi militer perlu dilakukan. Ancaman kestabilan dari negara luar juga dapat menimbulkan kenaikan yang sangat besar dalam pengeluaran ketentaraan dan akan memaksa pemerintah membelanjakan uang yang jauh lebih besar dari pendapatan pajak.

e. Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Permasalahan pembangunan yang terjadi menuntut adanya campur tangan pemerintah. Dengan adanya campur tangan pemerintah diharapkan

⁷⁶ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, hlm 168.

permasalahan kemiskinan dapat diatasi. Campur tangan pemerintah yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah yang menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal selain pajak. Faktor penting dalam penentuan pengeluaran pemerintah adalah tujuan-tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang tujuannya untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, menghindari inflasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.⁷⁷ Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Dalam hal ini ada tiga pertimbangan utama: untuk menyediakan lowongan pekerjaan baru, untuk meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat dan memperbaiki kesamarataan pembagian pendapatan.⁷⁸

Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak. Pengeluaran pemerintah ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan.⁷⁹ Maka, dari hal ini dapat diketahui bahwa instrumen kebijakan fiskal pemerintah melalui pengeluaran pemerintah diharapkan dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

f. Pengeluaran Pemerintah Dalam Perspektif Islam

Dalam ekonomi Islam, belanja negara dalam membiayai kepentingan publik berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan anggaran belanja yang rasional.

⁷⁷ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, hlm 168.

⁷⁸ *Ibid.*, hlm 331.

⁷⁹ Aan Jaelani. "Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017," hlm. 3

Anggaran belanja disusun sesuai dengan pendapatan pemerintah yang diperoleh dari sektor publik dan swasta, kemudian didistribusikan untuk berbagai kategori pengeluaran. Jadi, prinsip anggaran belanja adalah pendapatan yang tersedia menentukan jumlah untuk pengeluaran pemerintah. Jaelani menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah ditentukan sesuai dengan jumlah pendapatan yang tersedia dari sumber-sumber pendapatan yang tersedia. Anggaran biasanya surplus atau setidaknya anggaran berimbang.⁸⁰

Adapun sistem anggaran belanja di negara-negara modern justru sebaliknya. Estimasi pengeluaran pemerintah yang disusun kemudian ditemukan cara untuk menaikkan anggaran dengan manipulasi keuangan yang diperlukan oleh berbagai jenis pajak dan sumber pendapatan negara dalam rangka memenuhi keseimbangan pendapatan dengan pengeluaran. Hal ini berakibat, pengeluaran pemerintah sangat tinggi meskipun mengalami kelangkaan sumber daya. Akibatnya terjadi defisit anggaran yang akan dibiayai melalui pinjaman internal dan eksternal, pencetakan mata uang, dan sebagainya sehingga akhirnya menyebabkan inflasi, resesi, dan bahkan depresi ekonomi.

Teori pembelanjaan publik dalam ekonomi Islam berintikan adanya peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui program pembangunan yang direncanakan secara sistemik dan terprogram. Pendapatan dari zakat misalnya, tidak menjadi bagian dari anggaran umum karena manfaatnya telah ditetapkan dan disebutkan dengan jelas dalam al-Qur'an, seperti pada surat at-Taubah ayat 60. Pendapatan pemerintah yang diperoleh dari zakat akan diposisikan pada sumber dana yang terpisah dan didistribusikan untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu 8 kelompok penerima zakat.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Hasil
----	---------	-------	----------	-------

⁸⁰ Aan Jaelani. "Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective." *MPRA Paper No. 75445*. Germany: University Library of Munich. hlm 12.

1	Riana Puji Lestari (2017) ⁸¹	Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015	X_1 : Indeks Pembangunan Manusia X_2 : Pengangguran X_3 : PDRB Y : Kemiskinan	Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan PDRB berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung.
2	Restu Ratri Astuti (2015) ⁸²	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004-2012	X_1 : Jumlah Penduduk X_2 : Pertumbuhan Ekonomi X_3 : Pendidikan X_4 : Kesehatan Y : Jumlah Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk, Pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah penduduk miskin PDRB tidak berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin
3	Asrianti (2017) ⁸³	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran,	X_1 : Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran

⁸¹ Riana Puji Lestari, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015", (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 80-83

⁸² Restu Ratri Astuti, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004-2012" (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negri Yogyakarta, 2015), hlm. 74-78

⁸³ Asrianti, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia" (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 69

		dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia) X ₂ : Pengangguran) X ₃ : Belanja Pemerintah) Y: Kemiskinan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan) Belanja Pemerintah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kemiskinan
4	Siti Walida Mustamin (2017) ⁸⁴	Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan) X ₁ : Belanja Pemerintah) X ₂ : Inflasi) X ₃ : Investasi) X ₄ : Pertumbuhan Ekonomi) Y: Kemiskinan) Belanja pemerintah dan inflasi secara langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan sedangkan belanja pemerintah secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi) Invetasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan, sedangkan secara tidak langsung invvestasi tidak berpengaruh terhadap keiskinan

⁸⁴ Siti Walida Mustamin. "Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan", dalam *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 01, Vol. 01, Maret 2017, Makassar, 2017, hlm. 38

				<p>melalui pertumbuhan ekonomi</p> <p>) Pertumbuhan Ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan sedangkan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kemiskinan melalui pengangguran dan pengaruh pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung tidak berpengaruh terhadap kemiskinan melalui pendapatan perkapita</p>
5	Seri Jefry Adil Waruwu (2016) ⁸⁵	Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014	<p>) X₁: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>) X₂: Pengangguran</p> <p>) X₃: Belanja Pemerintah</p> <p>) X₄: Investasi</p> <p>) Y: Kemiskinan</p>	<p>) Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat Kemiskinan</p> <p>) Penganggura berpengaruh positif dan</p>

⁸⁵ Seri Jefry Adil Waruwu, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014" (Skripsi, Fakultas Kejuruan dan Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016), hlm. 144

				Signifikan terhadap tingkat Kemiskinan) Investasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan
6	Durrotul Mahsunah (2017) ⁸⁶	Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Timur) X ₁ : Jumlah Penduduk) X ₂ : Pendidikan) X ₃ : Pengangguran) Y: Kemiskinan) Jumlah Penduduk dan Pendidikan tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan di Jawa Timur) Pengangguran Berpengaruh positif terhadap tingkat Kemiskinan di Jawa Timur
7	Sirilius Seran (2017) ⁸⁷	Hubungan Antara Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan) X ₁ : Pendidikan) X ₂ : Pengangguran) X ₃ : Pertumbuhan Ekonomi) Y: Kemiskinan) Pendidikan dan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan) Pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan
8	Khalid Zaman, Dkk. (2011) ⁸⁸	Exploring link between Poverty-Population-Pollution (3Ps) in) X ₁ : Population) X ₂ : Pollution) Y: Poverty) Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap

⁸⁶ Durrotul Mahsunah. "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur", dalam *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Surabaya, 2017, hlm. 14

⁸⁷ Sirilius Seran. "Hubungan Pendidikan, Pegangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan", dalam *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.10, No. 2. Timor, 2017. hlm. 70

⁸⁸ Khalid Zaman, Dkk. "Exploring the Link Between Poverty-Pollution-Population (3Ps) in Pakistan: Time Series Evidence", in *Journal of Economics And Sustainable Development*, No. 11&12, Vol.2, 2011, Department of Mangement Sciences, COMSATS Institute of Information Technology, Abottabad, Pakistan and Department of Management Sciences, Bahria Universiy, Islambad, Pakistan, 2011. hlm. 36

		Pakistan : Time Series Evidence		kemiskinan di Pakistan J Polusi udara (degradasi lingkungan) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Pakistan
9	Bonivasius Prasetya dan David Kristianto (2017) ⁸⁹	Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan TPT terhadap Kemiskinan Di Indonesia	J X ₁ : Jumlah Penduduk J X ₂ : IPM J X ₃ : TPT J Y: Kemiskinan	J Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia J IPM berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia J TPT tidak berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia
10	Elda Wahyu Azizah, Dkk (2018) ⁹⁰	Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita, dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur	J X ₁ : Pendidikan J X ₂ : Pendapatan Perkapita J X ₃ : Jumlah Penduduk J Y: Kemiskinan	J Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan J Pendapatan Perkapita berpengaruh negatif terhadap kemiskinan J Jumlah penduduk

⁸⁹ Bonivasius Prasetya & David Kristianto, "Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan TPT terhadap kemiskinan di Indonesia", Working paper, Oktober, 2017, hlm. 11 <https://www.researchgate.net> diakses pada senin 05 Agustus 2019 Pukul 09:50 WIB

⁹⁰ Elda Wahyu Azizah, Dkk. "Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur", dalam *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.2 jilid 1, 2018, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018. hlm. 179

				berpengaruh positif terhadap kemiskinan
--	--	--	--	---

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan di negara-negara berkembang dan salah satunya adalah Indonesia. Penelitian tentang kemiskinan ini memiliki banyak variabel-variabel yang dapat mempengaruhinya sehingga begitu penting untuk melihat variabel yang paling mempengaruhi tingkat kemiskinan tersebut. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut beberapa karya pembahasan masalah kemiskinan di atas sangat penting dijadikan pendukung dalam skripsi ini sehingga dapat membantu penulis dalam melakukan penelitian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas tentang masalah Kemiskinan yang ada di Indonesia guna mencari solusi yang tepat dalam membantu menyelesaikan masalah pembangunan di Indonesia melalui beberapa indikator ekonomi makro yang dianggap penting untuk dibahas.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah membahas tentang pengaruh Kemiskinan melalui beberapa indikator ekonomi makro yang dipilih peneliti sesuai dengan masalah yang ada. Penelitian yang dilakukan saat ini juga merupakan gabungan dari beberapa variabel yang ada pada penelitian-penelitian terdahulu tersebut yang dianggap dapat mempengaruhi kemiskinan secara langsung dengan kerangka berfikir dan waktu yang berbeda. Sehingga variabel-variabel bebas yang digunakan untuk membuktikan tingkat kemiskinan (Y) di Indonesia pada tahun 1990-2017 ini diantaranya adalah Jumlah Penduduk (X_1), Pengangguran (X_2), dan Pengeluaran Pemerintah (X_3).

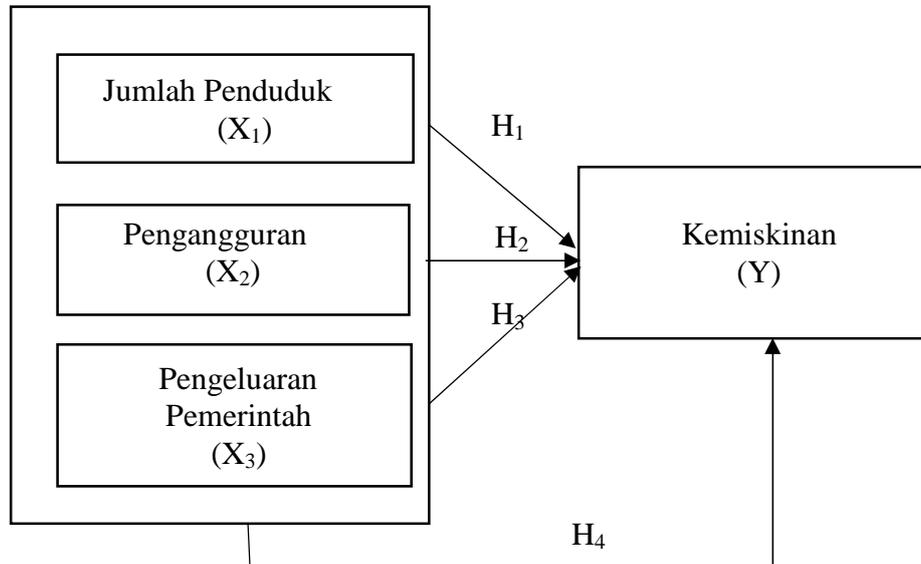
C. Kerangka Berfikir

Kemampuan pemerintah dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam perekonomian akan semakin mempercepat akselerasi pembangunan ekonomi. Kualitas pembangunan ekonomi akan semakin membaik dalam mengatasi masalah kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan yang selalu menjadi fokus utama setiap pemerintah dalam mewujudkan pembangunan nasional yang baik. Upaya yang

dilakukan diharapkan dapat diatasi dari akar masalahnya. Dalam penelitian ini Jumlah Penduduk, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah dijadikan sebagai variabel bebas yang diduga secara parsial mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia.

Jumlah Penduduk dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan akibat dari besarnya jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan lapangan pekerjaan serta kualitas sumber daya manusia yang baik sehingga tidak dapat bersaing dalam perekonomian yang mengakibatkan terjadinya banyak pengangguran dan akibatnya adalah rendahnya kesejahteraan hidup penduduk yang dapat mengarah kepada jurang kemiskinan. Pengangguran dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan karena disebabkan oleh menjadi rendahnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga harus mengurangi tingkat konsumsinya sehingga berakibat pada menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang berdampak pada kemiskinan.

Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi kemiskinan disebabkan perannya dalam mengendalikan perekonomian yang dapat mengatasi masalah yang ada melalui kebijakn fiskal dalam hal ini adalah pengeluaran pemerintah yang terdapat dalam APBN yang berfungsi untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan melalui program-program yang telah direncanakan dalam APBN tersebut. Skema hubungan antara kemiskinan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2. Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian yang masih perlu diuji dan dibuktikan secara empiris tingkat kebenarannya dengan menggunakan data-data yang berhubungan. Berdasarkan landasan teori di atas, penelitian terdahulu dan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H₀₁: Jumlah Penduduk (X₁) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)
Ha₁: Jumlah penduduk (X₁) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)
2. H₀₂: Pengangguran (X₂) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)
Ha₂: Pengangguran (X₂) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)
3. H₀₃: Pengeluaran Pemerintah (X₃) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)
Ha₃: Pengeluaran pemerintah (X₃) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)
4. H₀₄: Jumlah Penduduk (X₁), Pengangguran (X₂), dan Pengeluaran Pemerintah (X₃) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)
Ha₄: Jumlah Penduduk (X₁), Pengangguran (X₂), dan Pengeluaran Pemerintah (X₃) berpengaruh terhadap Kemiskinan (Y)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih yang dalam proses pelaksanaan penelitiannya banyak menggunakan angka-angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran, sampai pada hasil atau penarikan kesimpulan.⁹¹ Rancangan penelitian disusun berdasarkan dokumentasi laporan ekonomi di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam penelitian terdiri dari jumlah penduduk, pengangguran, pengeluaran pemerintah dan kemiskinan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini lokasi penelitian dilakukan di Indonesia secara keseluruhan yang di ambil berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari publikasi BPS dan World Bank.

2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah pada tanggal 1 Januari 2019 s/d selesai dengan menggunakan data *time series* (runtut waktu) yang diambil melalui publikasi BPS dan World Bank.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.⁹² Sampel adalah bagian dari keseluruhan jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.

⁹¹ Imam Machali, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: MPI, 2017), hlm. 17.

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan laporan ekonomi Indonesia yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik Indonesia dan World Bank. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh laporan ekonomi yang digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini yaitu jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah dan kemiskinan tahun 1990 sampai dengan tahun 2018.

D. Data Penelitian

Berdasarkan sumbernya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi, telah dikumpulkan oleh pihak lain. Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk numerik atau bilangan yaitu berupa angka-angka.⁹³ Data kuantitatif dalam penelitian ini berupa data runtut waktu (*time series*) dengan periode penelitian tahun 1990 sampai dengan tahun 2018. Data tersebut diperoleh dari laporan ekonomi Indonesia yang telah dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan World Bank

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah bersumber dari data sekunder. Dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang telah dirumuskan.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi yang dikumpulkan merupakan data dari laporan ekonomi Indonesia berupa data jumlah penduduk, jumlah pengangguran, jumlah pengeluaran pemerintah dan jumlah penduduk miskin mulai dari tahun 1990-2018.

⁹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 117.

⁹³ *Ibid.*

F. Definisi Operasional Variabel

Operasionalisasi variabel penelitian adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk memberikan definisi setiap variabel yang dilibatkan di dalam model penelitian sehingga tidak kehilangan arah dalam penelitian.⁹⁴ Menurut Sugiyono, definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.⁹⁵ Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel yang digunakan. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kemiskinan (Y). Variabel independent yang digunakan adalah jumlah penduduk (X_1), pengangguran (X_2), dan pengeluaran pemerintah (X_3).

Definisi operasional variabel-variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kemiskinan (Y)

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makanan maupun non makanan. Kemiskinan dalam penelitian ini digambarkan menggunakan jumlah penduduk miskin yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan yang mencakup kebutuhan makanan dan non makanan dalam satuan jiwa. Indikator kemiskinan yang digunakan adalah data jumlah penduduk miskin dalam satuan jiwa tahun 1990-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Jumlah Penduduk (X_1)

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Indikator jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini dinyatakan dalam satuan jiwa tahun 1990-2018 yang datanya diperoleh dari World Bank.

⁹⁴ Budi Trianto, *Riset Modeling*, (Pekanbaru: Adh Dhuha Institute, 2016), hlm 32.

⁹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, hlm 31.

3. Pengangguran (X_2)

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Indikator pengangguran dalam penelitian ini adalah jumlah pengangguran di Indonesia dalam satuan jiwa selama tahun 1990-2018 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

4. Pengeluaran Pemerintah (X_3)

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk Nasional. Indikator pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah jumlah pengeluaran pemerintah dalam satuan rupiah yang diambil dari publikasi World Bank mulai dari tahun 1990-2018.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model ini menggunakan program *Eviews 7* dengan prosedur metode OLS (*Ordinary Least Squares*).

1. OLS (*Ordinary Least Squares*)

Penelitian ini menggunakan metode model OLS atau dikatakan metode kuadrat terkecil biasa. Metode OLS adalah metode yang digunakan untuk mengestimasi suatu garis regresi dengan cara mencari nilai minimal untuk jumlah kuadrat kesalahan antara nilai prediksi dengan nilai kenyataannya. Oleh karena itu, metode ini disebut *Least Square*.⁹⁶ Metode model OLS sesuai dengan penelitian ini karena penelitian ini menganalisis untuk mengetahui pengaruh satu arah dari variabel independent yaitu jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap variabel dependent yaitu kemiskinan dalam

⁹⁶ <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ordinary-least-squares-ols/116519>, diakses pada tanggal 14 April 2019, pukul 00:37 WIB

jangka panjang. Analisis OLS menjelaskan bagaimana mencapai hasil estimasi yang dekat dengan kebenaran kenyataannya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series*. Karena jenis datanya *time series* dan permodelan menggunakan model *Ordinary Least Squares* (OLS), maka model regresinya adalah:

$$KM = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$KM = \beta_0 + \beta_1 JP + \beta_2 PG - \beta_3 PP + e$$

Keterangan:

KM = Kemiskinan

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel bebas

JP = Jumlah Penduduk

PG = Pengangguran

PP = Pengeluaran Pemerintah

e = *error*

Untuk menghitung persamaan regresi melalui model OLS, maka data harus memenuhi Uji Asumsi Klasik, yaitu: uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi.

2. Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih akurat, maka model asumsi klasik harus diuji. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui normal atau tidaknya suatu distribusi data.⁹⁷ Suatu model regresi dikatakan baik apabila memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Normalitas dapat diuji dengan beberapa metode, salah satunya dengan *Jarque-Bera* (JB Test). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas *Jarque-Bera* (JB) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya

⁹⁷ Budi Trianto, *Riset Modeling*, hlm 119.

lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linier atau tidak.⁹⁸ Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0,05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linearitas dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari 0,05 maka model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Probabilitas F hitung dapat dilihat pada baris F-statistic kolom *Probability*

c. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan diantara variabel bebas memiliki masalah multikorelasi atau tidak (antara variabel bebas dan terikat tidak boleh saling berhubungan). Multikolinieritas adalah korelasi yang sangat tinggi atau sangat rendah yang terjadi pada hubungan diantara variabel bebas.⁹⁹ Multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai $VIF < 10$, tingkat kolinearitas dapat ditoleransi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah gejala terjadinya hubungan antara variabel-variabel bebas atau berkorelasi sendiri. Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu atau tempat. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Adanya gejala autokorelasi dalam regresi menyebabkan model yang

⁹⁸ *Ibid.*, hlm 123.

⁹⁹ *Ibid.*, hlm 121.

dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk nilai variabel dependen dari variabel independen tertentu. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.

Pada umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*. Autokorelasi dapat dilihat dari hasil uji *Breusch-Godfrey* (BG) atau yang biasa dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier*. Uji BG adalah uji yang direkomendasikan untuk menguji autokorelasi dalam sebuah model. Kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* > (5%), berarti tidak ada terjadi autokorelasi pada data. Sebaliknya apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* < (5%), berarti ada terjadi autokorelasi pada data.

e. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan (variabel bebas) tidak memiliki nilai varian yang sama, sedangkan asumsi yang dipenuhi dalam regresi linear klasik adalah mempunyai nilai varian yang sama (konstan)/homoskedastisitas. Gejala heteroskedastisitas akan muncul apabila variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lain. Jika varians tidak berubah maka disebut homokedastisitas dan jika tidak disebut heterokedastisitas. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien.

Model regresi yang baik adalah yang bebas dari gejala heteroskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Test*. Jika nilai probabilitas *Obs*Rsquared* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Uji Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama jumlah

penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan. Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Apabila nilai $prob F <$ taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengambilan keputusan berdasarkan apabila nilai $p\text{-value} <$ dengan taraf signifikansi 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

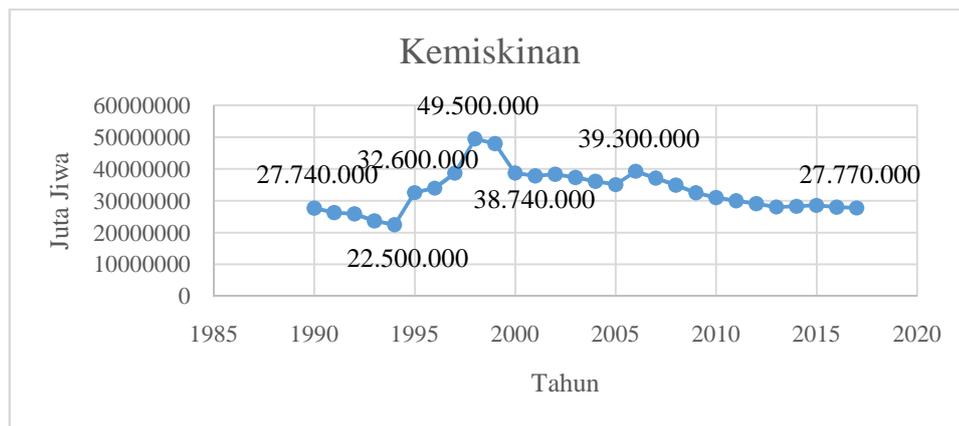
Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel bebas dapat menerangkan dengan baik atau seberapa besar sumbangannya terhadap variasi variabel terikat. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). nilai R^2 berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin besar R^2 semakin baik modelnya. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

5. Deskripsi Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan dalam penelitian ini diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. Data jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 1990-2018 pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam satuan juta jiwa. Secara umum, jumlah penduduk miskin di Indonesia mengalami fluktuasi. Hal ini merupakan hasil dari setiap usaha yang telah dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan tersebut.



Sumber: *Data diolah*, 2019

Gambar 4.1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 1990-2018

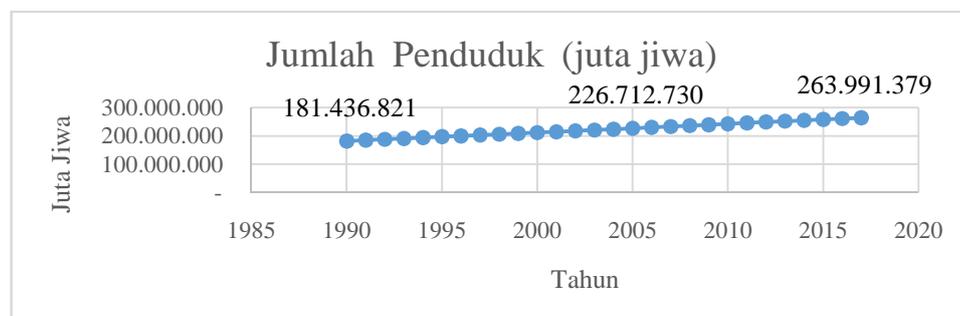
Perkembangan jumlah penduduk miskin yang terlihat dalam gambar 4.1 secara umum menurun walaupun pada beberapa tahun tertentu mengalami peningkatan yang signifikan yaitu dimulai dari tahun 1995-1998. Peningkatan jumlah penduduk miskin saat itu disebabkan oleh harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut yang naik tinggi. Keadaan tersebut mengakibatkan banyak penduduk yang tergolong tidak miskin tapi penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Selain itu, pada periode tersebut terjadi krisis ekonomi yang menambah buruknya perekonomian negara.

Setelah krisis ekonomi pada tahun 1999-2018 jumlah penduduk miskin kembali mengalami penurunan dari 47.970.000 jiwa pada tahun 1999 menjadi 27.770.000 jiwa pada tahun 2017 meskipun penurunan jumlah penduduk miskin ini tidak lebih sedikit dari jumlah penduduk miskin pada tahun 1990. Diantara penurunan jumlah penduduk miskin yang terjadi diantara tahun 1999-2017, pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan yaitu sebesar 39.300.000 jiwa. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk miskin setelah masa krisis yang dimulai dari tahun 1999-2018 telah mengalami penurunan akan tetapi penurunannya belum terlalu besar.

Meskipun penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia belum begitu besar tetapi segala upaya dan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah dalam menekan angka kemiskinan setiap tahunnya melalui program penanggulangan kemiskinan yang anggarannya selalu naik tiap tahun sudah cukup baik. Dengan kata lain, secara teoritis pengeluaran pemerintah memainkan peranan penting dalam mengatasi penurunan kemiskinan.

6. Deskripsi Jumlah Penduduk di Indonesia

Data jumlah penduduk dalam penelitian ini diambil dari publikasi World Bank. Data jumlah penduduk di Indonesia dari tahun 1990-2018 pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam satuan juta jiwa. Menurut data World Bank, jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Berikut ini adalah gambar grafik jumlah penduduk Indonesia dari tahun 1990-2018:



Sumber: *Data diolah, 2019*

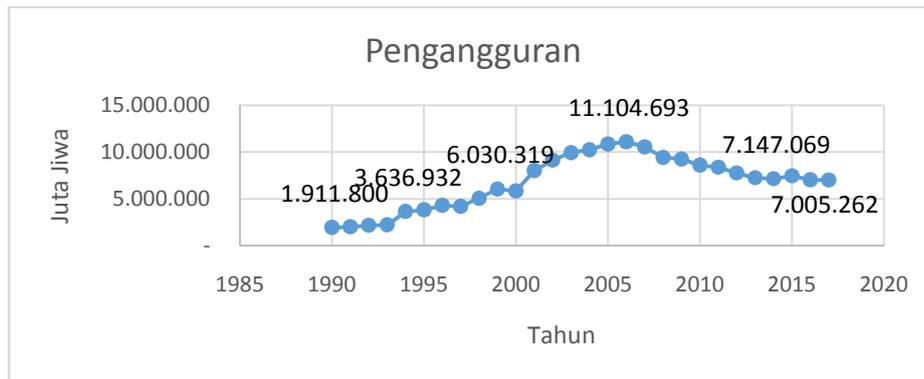
Gambar 4.2 Grafik Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 1990-2018

Grafik diatas menunjukkan tren jumlah penduduk di Indonesia yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 1990 jumlah penduduk Indonesia sebanyak 181.436.821 jiwa meningkat menjadi 226.712.730 pada tahun 2005 sampai tahun 2018 jumlah penduduk Indonesia juga semakin meningkat menjadi 267,663,435. Jumlah ini menempatkan Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, setelah Tiongkok, India dan Amerika Serikat.

Jumlah penduduk tersebut, apabila diproyeksikan apa adanya tanpa intervensi pemerintah akan meningkat menjadi sekitar 280 juta jiwa atau naik sebesar 30 juta jiwa atau tambah rata-rata 4 juta jiwa pertahun. Sumber daya manusia yang banyak ini jika dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai faktor produksi dapat bermanfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan harus diseimbangkan pula dengan jumlah lapangan kerja.

7. Deskripsi Pengangguran di Indonesia

Jumlah pengangguran dalam penelitian ini diambil dari publikasi Badan Pusat Statistik Indonesia. Data jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1990-2018 pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam satuan juta jiwa. Indonesia dengan penambahan jumlah penduduk yang banyak sehingga dapat menimbulkan tenaga kerja yang banyak pula. Hal ini di sebabkan karena penambahan tenaga kerja baru lebih besar di bandingkan dengan kesediaan lapangan pekerjaan. Berikut ini adalah gambar grafik jumlah pengangguran di Indonesia dari tahun 1990-2018:



Sumber: *Data diolah, 2019*

Gambar 4.3 Grafik Jumlah Pengangguran Indonesia Tahun 1990-2018

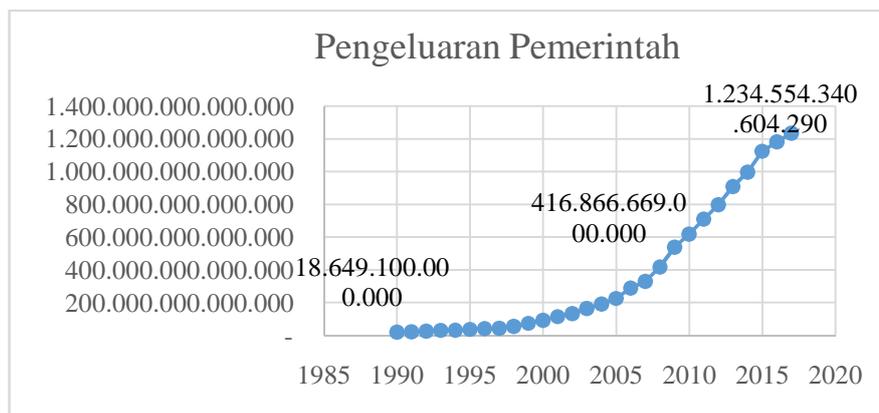
Jumlah pengangguran di Indonesia tahun 1990-2018 yang disajikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan dua kondisi dimana dari tahun 1990-2006 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 1.911.800 jiwa pada tahun 1990 menjadi 11.104.693 jiwa pada tahun 2006 dan mengalami penurunan yang di mulai dari tahun 2007 sejumlah 10.547.917 jiwa hingga menjadi 6,871,264 jiwa pada tahun 2018. Namun, penurunan ini tidak lebih sedikit dibandingkan pada tahun 1990 yang hanya sebesar 1.911.800 jiwa.

Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih tinggi. Tingginya jumlah penduduk di Indonesia dengan tidak diikutinya ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan menambah masalah pembangunan di negara berkembang untuk mengentaskan kemiskinan yaitu pengangguran.

8. Deskripsi Pengeluaran Pemerintah di Indonesia

Jumlah pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini diambil dari publikasi World Bank. Data pengeluaran pemerintah di Indonesia dari tahun 1990-2018 pada penelitian ini merupakan data sekunder dalam satuan miliar rupiah. Instrumen kebijakan fiskal pemerintah melalui pengeluaran pemerintah memiliki hubungan negatif terhadap pengurangan kemiskinan yaitu jika pengeluaran pemerintah tinggi diharapkan dapat membantu menciptakan

lapangan pekerjaan yang berdampak pada pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Berikut ini adalah grafik pengeluaran pemerintah tahun 1990-2018 yang bersumber dari World Bank.



Sumber: *Data diolah, 2019*

Gambar 4.4 Grafik Pengeluaran Pemerintah Indonesia Tahun 1990-2018

Berdasarkan publikasi yang dilakukan oleh World Bank mengenai jumlah pengeluaran pemerintah Indonesia setiap tahunnya mulai dari tahun 1990-2018 selalu mengalami peningkatan. Pengeluaran ini tentunya digunakan oleh pemerintah pada setiap periodenya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah yang salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pembangunan yang berdampak kepada pengurangan kemiskinan. Gambar 4.4 selama periode 1990-2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.18.649.100.000.000 hingga mencapai Rp. 1.332.534.472.426.250 pada tahun 2018.

B. Uji Asumsi Klasik

Teknik analisis yang digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Model ini menggunakan program *Eviews 7* dengan prosedur metode OLS (*Ordinary Least Squares*). Untuk menghitung persamaan regresi melalui model OLS, maka data harus memenuhi

Uji Asumsi Klasik, yaitu: uji normalitas, uji linearitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi.

7. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable berkaitan dan variable independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dapat diuji dengan beberapa metode, salah satunya dengan *Jarque-Bera* (JB Test). Uji ini dilakukan dengan membandingkan probabilitas *Jarque-Bera* (JB) hitung dengan tingkat alpha 0,05 (5%). Apabila Probabilitas JB hitung lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal dan sebaliknya, apabila nilainya lebih kecil maka tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa residual berdistribusi normal. Berikut ini adalah hasil uji normalitas:

Tabel 4.1 Uji Normalitas

<i>Tests for Normality</i>	
Skewness	0.779464
Kurtosis	4.344449
Jarque-Bera	5.120674
Probability	0.077279

Sumber: *Data diolah*, 2019

Berdasarkan uji normalitas di atas, probabilitas sebesar 0.077279 yang menunjukkan bahwa probability > 0.05 (5%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

8. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki sesuai dengan garis linier atau tidak. Apabila nilai probabilitas F hitung lebih besar dari tingkat alpha 0.05 (5%) maka model regresi memenuhi asumsi linearitas dan sebaliknya, apabila nilai probabilitas F hitung lebih kecil dari 0.05 maka model tidak memenuhi asumsi linieritas. Nilai Probabilitas F hitung dapat dilihat pada baris F-statistic kolom *Probability* pada hasil uji linearitas berikut ini:

Tabel 4.2 Uji Linearitas

Ramsey RESET Test			
	Value	df	Probability
t-statistic	0.250742	24	0.8041
F-statistic	0.062872	(1, 24)	0.8041
Likelihood ratio	0.075870	1	0.7830

Sumber: *Data diolah, 2019*

Dari hasil Uji linearitas yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai Prob. F-hitung sebesar 0.8041 lebih besar dari tingkat alpha 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi linieritas.

9. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antar variabel – variabel independen dalam suatu model regresi. Multikolinieritas dapat dilihat dari *Variance Inflation Factors* (VIF). Jika nilai $VIF < 10$, maka tingkat kolinearitas dapat ditoleransi. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas:

Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas

<i>Variance Inflation Factors</i>		
	Coefficient	Centered
Variable	Variance	VIF
C	2.76E+14	NA
D(JP)	30.09915	1.329685
D(PG)	1.505458	1.383944
D(PP)	4.98E-16	1.540663

Sumber: *Data diolah, 2019*

Dari hasil uji multikolinearitas pada tabel 4.4 diperoleh hasil nilai VIF pada pada variabel jumlah penduduk (JP) sebesar 1.329685, nilai VIF pada pada variabel pengangguran (PG) sebesar 1.383944 dan nilai VIF pada pada variabel pengeluaran pemerintah (PP) sebesar 1.540663 sehingga, masing-masing nilai

VIF dari ketiga variabel $VIF < 10$ yang mengindikasikan tidak adanya multikolinearitas pada model ini dan lolos uji multikolinearitas.

10. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linear ada kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada masalah autokorelasi. Adanya gejala autokorelasi dalam regresi menyebabkan model yang dihasilkan tidak dapat dipergunakan untuk nilai variabel dependen dari variabel independen tertentu. Model regresi yang baik adalah regresi yang independen dari autokorelasi.

Pada umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*. Autokorelasi dapat dilihat dari hasil uji *Breusch-Godfrey* (BG) atau yang biasa dikenal dengan uji *Lagrange Multiplier*. Uji BG adalah uji yang direkomendasikan untuk menguji autokorelasi dalam sebuah model. Kriteria untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi adalah apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* $> (5\%)$, berarti tidak ada terjadi autokorelasi pada data. Sebaliknya apabila nilai probabilitas *Obs*R-squared* $< (5\%)$, berarti ada terjadi autokorelasi pada data.

Tabel 4.4 Uji Autokorelasi

<i>Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:</i>			
F-statistic	0.922454	Prob. F(2,21)	0.4124
Obs*R-squared	2.166392	Prob. Chi-Square(2)	0.3385

Sumber: *Data diolah, 2019*

Dari hasil Uji LM yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai Prob.*Obs*R-squared* sebesar 0.3385. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai Prob.*Obs*R-squared* yang lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka model tidak terjadi autokorelasi.

11. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Gejala

heteroskedastisitas akan muncul apabila variabel pengganggu memiliki varian yang berbeda dari satu observasi ke observasi lain. Jika varians tidak berubah maka disebut homokedastisitas dan jika tidak disebut heterokedastisitas. Adanya heteroskedastisitas menyebabkan estimasi koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien.

Model regresi yang baik adalah yang independen dari gejala heteroskedastisitas. Pengujian masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan *White Heteroscedasticity Test*. Jika nilai probabilitas *Obs*R-squared* lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dengan menggunakan metode tersebut diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5 Uji Heteroskedastisitas

<i>Heteroskedasticity Test: White</i>			
F-statistic	1.186653	Prob. F(3,24)	0.3601
Obs*R-squared	10.42670	Prob. Chi-Square(3)	0.3171

Sumber: *Data diolah, 2019*

Dari hasil Uji *White* yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.3171. Karena nilai Prob lebih besar dari tingkat alpha (0,05), maka model tidak terjadi heteroskedastisitas.

12. Hasil Estimasi

Penelitian ini menggunakan estimasi data *time series* pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia tahun 1990-2018. Untuk mengestimasi data *time series*, digunakan pemodelan OLS (*Ordinary Least Square*). Hasil Regresi OLS (*Ordinary Least Square*) diperoleh sebagai berikut:

a. Regresi OLS (*Ordinary Least Square*)

Hasil analisis regresi data *time series* digunakan untuk mengetahui seberapa jauh variabel jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Dari hasil

regresi data *time series* dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) diperoleh persamaan regresi sebagai berikut.

$$KM = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$KM = \beta_0 + \beta_1 JP + \beta_2 PG - \beta_3 PP + e$$

Hasil estimasi koefisien variabel jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Indonesia terdapat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6 Hasil Regresi

Variable	Coefficient	Prob.
C	-88.52110	0.0265
LOG(JP)	6.560468	0.0078
LOG(PG)	6.56E-08	0.0000
LOG(PP)	-0.631592	0.0024

Sumber: *Data diolah, 2019*

Dari hasil pengolahan data *times series* dengan estimasi OLS (*Ordinary Least Square*) pada tabel 4.12 diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$KM = -88.52110 + 6.5 \quad \text{JP} + 0.00656P - 0.6 \quad \text{PP}$$

Keterangan:

KM = Kemiskinan

β_0 = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi variabel independen

JP = Jumlah Penduduk

PG = Pengangguran

PP = Pengeluaran Pemerintah

Persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa koefisien konstanta sebesar -249000. Nilai negatif dalam konstanta menunjukkan bahwa di luar tiga variabel independen yang di pilih dalam penelitian terdapat variabel-variabel sistematis lainnya yang juga mempengaruhi tetapi tidak dimasukkan dalam model penelitian. Akibatnya, variabel-variabel tersebut mempengaruhi konstanta menjadi negatif.

Hasil regresi variabel jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas (*p-value*) < sig yaitu sebesar $0.0078 < 0.05$. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar 6.560468 menunjukkan hubungan yang positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan jumlah penduduk sebesar 1% akan menaikkan jumlah penduduk miskin sebanyak 6.5% dalam jangka panjang dengan asumsi hal-hal lain dianggap tetap.

Hasil perhitungan regresi dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) diperoleh nilai probabilitas pengangguran lebih kecil dari nilai signifikansi (0.05) yaitu $0.0000 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien pengangguran sebesar 0.00656 menunjukkan hubungan yang positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 0.0065% dalam jangka panjang dengan asumsi hal-hal lain dianggap tetap.

Hasil perhitungan regresi dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) diperoleh nilai probabilitas pengeluaran pemerintah lebih kecil dari nilai signifikansi (0.05) yaitu $0.0024 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar -0.631592 menunjukkan hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0.63% dalam jangka panjang dengan asumsi hal-hal lain dianggap tetap.

C. Uji Statistik

4. Uji Simultan (Uji Statistik F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan.

Dasar pengambilan keputusan dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Apabila nilai $prob F <$ taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7 Hasil Uji Statistik F

<i>Uji F Signifikansi Simultan</i>	
R-squared	0.571740
Adjusted R-squared	0.520349
F-statistic	11.12525
Prob(F-statistic)	0.000079

Sumber: *Data diolah, 2019*

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 4.7 dengan menggunakan *software Eviews 7*, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11.12525 dan probabilitas F sebesar 0.000079. Nilai probabilitas F lebih kecil dari taraf signifikansi 5% ($=5\%$) yaitu $0.000079 < 0.05$ maka uji F signifikan yang artinya variabel jumlah penduduk, pengangguran, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

5. Uji Parsial (Uji Statistik t)

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Pengambilan keputusan berdasarkan apabila nilai *p-value* yang dilihat dari kolom probability lebih kecil dari taraf signifikansi 5% dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel terikat. Hasil uji parsial (Uji statistik t) dapat dilihat dari table di bawah ini:

Tabel 4.8 Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	-88.52110	-2.358065	0.0265
LOG(JP)	6.560468	2.891599	0.0078
LOG(PG)	6.56E-08	5.256717	0.0000
LOG(PP)	-0.631592	-3.377568	0.0024

Sumber: *Data diolah, 2019*

a. Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel jumlah penduduk memiliki probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0078. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel jumlah penduduk secara individu signifikan mempengaruhi kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 6.560468 menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

b. Pengaruh Pengangguran terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengangguran memiliki probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0000. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pengangguran secara individu berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar 0.00656 menunjukkan bahwa pengangguran memiliki hubungan yang positif terhadap kemiskinan di Indonesia.

c. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah memiliki probabilitas (*p-value*) sebesar 0.0024. Dalam taraf signifikansi 5% maka variabel pengeluaran pemerintah secara individu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien regresi sebesar -0.631592 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di Indonesia.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variasi variabel independen dapat menerangkan dengan baik atau seberapa

besar sumbangannya terhadap variasi variabel terikat. Untuk mengukur kebaikan suatu model (*goodness of fit*) dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2). nilai R^2 berkisar antara nol sampai dengan satu. Semakin besar R^2 semakin baik modelnya. Nilai R^2 kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Pada tabel 4.7 diperoleh nilai R^2 sebesar 0.571740 yang memiliki arti bahwa variasi seluruh variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 57.1%. Sedangkan sisanya sebesar 42.9% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai probabilitas dan koefisien masing-masing sebesar $0.0078 < 0.05$ dan 6.560468.

. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bonivasius Prasetya dan David Kristianto pada tahun 2017 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap kemiskinan.¹⁰⁰ Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mustika tahun 2011 dalam Bonivasius Prasetya dan David Kristianto tahun 2017 menjelaskan bahwa Jumlah penduduk yang banyak menyebabkan persediaan tenaga kerja yang banyak pula, akan tetapi tidak semua tenaga kerja dapat terserap di tiap sektor produksi, sehingga membuat mereka tidak mempunyai pendapatan untuk memenuhi kebutuhan, yang kemudian

¹⁰⁰ Bonivasius Prasetya & David Kristianto, "Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan TPT terhadap kemiskinan di Indonesia", Working paper, Oktober, 2017, <https://www.researchgate.net> diakses pada senin 05 Agustus 2019 Pukul 09:50 WIB

terjerumus dalam kemiskinan.¹⁰¹ Menurut Nelson dan Leibstein terdapat pengaruh langsung antara pertumbuhan penduduk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Nelson dan Leibstein menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tidak mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang akan mengalami penurunan kesejahteraan serta meningkatkan jumlah penduduk miskin.¹⁰²

Bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Restu Ratri Astuti pada tahun 2015 yang menjelaskan bahwa jumlah penduduk berpengaruh negatif dengan kemiskinan.¹⁰³ Ada beberapa hal yang menjadikan penduduk sebagai pemacu pembangunan dan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Penduduk sebagai pemacu pembangunan karena populasi yang lebih besar adalah pasar potensial yang menjadi sumber permintaan akan berbagai macam barang dan jasa yang kemudian akan menggerakkan berbagai macam kegiatan ekonomi sehingga menciptakan skala ekonomi dalam produksi yang menguntungkan semua pihak, menurunkan biaya produksi dan menciptakan sumber pasokan atau penawaran tenaga kerja murah dalam jumlah yang memadai sehingga pada gilirannya akan merangsang output atau produksi agregat yang lebih tinggi lagi dan pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang berarti tingkat kemiskinan akan turun.¹⁰⁴

Dengan demikian, kenaikan jumlah penduduk yang terus menerus dikhawatirkan akan menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi yang berimbas terhadap prospek pengurangan kemiskinan dan upaya pembangunan semakin jauh.

¹⁰¹ *Ibid.*,

¹⁰² Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah Dan Dasar Kebijakan*, (Cet. VIII; Jakarta: Kencana, 2018), Hlm.100.

¹⁰³ Restu Ratri Astuti, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Indonesia Tahun 2004-2012", (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 76

¹⁰⁴ *Ibid.*,

2. Pengangguran

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Hasil penelitian ini menunjukkan nilai probabilitas yaitu $0.0000 < 0.05$ yang berarti bahwa pengangguran berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien pengangguran sebesar 0.00656 menunjukkan hubungan yang positif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan jumlah pengangguran sebesar 1% akan diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk miskin sebanyak 0.0065% dalam jangka panjang dengan asumsi hal-hal lain dianggap tetap.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengangguran berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap kemiskinan. Adapun penelitian yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Asrianti pada tahun 2017, Durrotul Mahsunah tahun 2017 dan Sirilius Seran tahun 2017 bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap kemiskinan. Permasalahan yang ditimbulkan akibat tingginya jumlah penduduk adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja. Sehingga, terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Masyarakat yang berada di dalam kondisi tidak bekerja (menganggur) maka masyarakat tersebut akan mengalami kesulitan di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, sehingga akan menyebabkan tingkat kemiskinan di dalam kehidupan bermasyarakat akan meningkat. Salah satu faktor penting yang menentukan kemakmuran suatu masyarakat adalah tingkat pendapatannya.¹⁰⁵

Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) dapat diwujudkan. Jika tidak maka akan terjadi pengangguran dan berdampak buruk dengan berkurangnya tingkat pendapatan masyarakat sehingga akan mengurangi tingkat kemakmuran yang berimbas kepada kemiskinan. Hubungan yang erat sekali antara tingginya

¹⁰⁵ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers 2015), hlm 13.

tingkat pengangguran dan kemiskinan. Bagi sebagian besar masyarakat, yang tidak mempunyai pekerjaan tetap atau hanya *part-time* selalu berada diantara kelompok masyarakat yang miskin. Masyarakat yang bekerja dengan bayaran tetap disektor pemerintah dan swasta biasanya termasuk diantara kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.¹⁰⁶ Setiap orang yang tidak mempunyai pekerjaan adalah miskin, sedangkan yang bekerja secara penuh.

Berbeda dengan penelitian dari Riana Puji Lestari pada tahun 2017, dimana hasil penelitiannya menunjukkan adanya pengaruh negatif yang signifikan dari pengangguran terhadap kemiskinan. Kondisi ini disebabkan bahwa tidak semua rumah tangga miskin menjadi penganggur. Pernyataan tersebut dapat dipahami mengingat di negara berkembang seperti Indonesia tidak terdapat jaminan sosial bagi penganggur, sehingga orang miskin untuk bertahan hidup mau tidak mau harus bekerja meskipun hanya beberapa jam seminggu.¹⁰⁷ Orang yang menganggur dalam sebuah rumahtangga, tetapi ada anggota rumah tangga yang lain yang bekerja dengan tingkat pendapatan tinggi sehingga cukup untuk menyokong penganggur. Dalam kaitannya dengan kemiskinan, penganggur yang ada di rumah tangga tersebut tidak secara otomatis menjadi miskin karena ada anggota keluarga lain yang memiliki pendapatan yang cukup untuk mempertahankan keluarganya hidup berada di atas garis kemiskinan. Selain itu, penganggur yang memiliki pendidikan hanya akan mencari pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan bidang maupun tingkat penghasilan yang diinginkan saja, dan tidak mau mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan bidang dan tingkat upah yang diharapkan.

3. Pengeluaran Pemerintah

¹⁰⁶ Lincoln Arsyad, *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*, (Yogyakarta: BPFE,1999), hlm. 25-26.

¹⁰⁷ Riana Puji Lestari, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017), hlm. 87

Pengeluaran pemerintah adalah suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya yang tercermin dalam APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk Nasional. Hasil perhitungan regresi dengan model OLS (*Ordinary Least Square*) diperoleh nilai probabilitas pengeluaran pemerintah lebih kecil dari nilai signifikansi (0.05) yaitu $0.0024 < 0.05$ yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Nilai koefisien pengeluaran pemerintah sebesar -0.631592 menunjukkan hubungan yang negatif terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, setiap kenaikan jumlah pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan diikuti dengan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 0.63% dalam jangka panjang dengan asumsi hal-hal lain dianggap tetap.

Adanya hubungan negatif antara pengeluaran pemerintah dengan kemiskinan memberikan artian bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah di Indonesia membawa dampak terhadap kemiskinan di Indonesia. Apabila pengeluaran pemerintah di Indonesia semakin meningkat, maka dalam jangka panjang pengaruh tersebut akan menjadi faktor yang dapat menurunkan kemiskinan di Indonesia.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Seri Jefry Adil Waruwu pada tahun 2016 dan Siti Walida Mustamin tahun 2017 yang menyatakan bahwa belanja/pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Beberapa tujuan penting dari kegiatan pemerintah adalah mengatasi masalah pengangguran, menghindari inflasi dan mempercepat pembangunan dalam jangka panjang.¹⁰⁸ Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran eksogen yang besarnya ditentukan oleh sejauh mana ketersediaan anggaran pemerintah yang diperoleh dari pajak.

Pengeluaran pemerintah ditujukan kepada upaya penyediaan infrastruktur berupa fasilitas umum, maupun berupa transfer langsung yang ditujukan untuk

¹⁰⁸ Sadono Sukirno, *Makroekonomi: Teori Pengantar*, hlm. 168.

pemerataan pendapatan dan mengatasi masalah kemiskinan.¹⁰⁹ Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berperan penting dalam pengentasan kemiskinan.

¹⁰⁹ Aan Jaelani, "Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017," Munich Personal RePeC Archive Paper No. 77423, Maret 2017, Cirebon 2017, hlm 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990-2018. Hal ini didasarkan pada hasil regresi linear berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 6.560468 dan nilai probabilitas sebesar 0.0052 pada taraf signifikansi sebesar 5% sehingga dapat di jelaskan bahwa semakin tinggi jumlah penduduk maka akan menyebabkan persediaan tenaga kerja yang banyak pula namun tidak semua tenaga kerja dapat terserap di setiap sektor produksi yang kemudian berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.
2. Pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990-2017. Hal ini didasarkan pada hasil regresi linear berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar 0.00656 dan nilai probabilitas sebesar 0.0000 pada taraf signifikansi 5% sehingga dapat di jelaskan bahwa semakin tingginya jumlah pengangguran akan menyebabkan rendahnya pendapatan yang diperoleh masyarakat yang mengakibatkan menurunnya kesejahteraan sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990-2017. Hal ini didasarkan pada hasil regresi linear berganda dengan nilai koefisien regresi sebesar -0.631592 dan nilai probabilitas sebesar 0.0024 pada taraf signifikansi 5% sehingga dapat di jelaskan bahwa pengeluaran pemerintah bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan cara mengalokasikan pengeluaran tersebut kepada sektor-sektor produktif sehingga dapat merangsang perekonomian.
4. Jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 1990-2017. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk dan pengangguran dapat

meningkatkan jumlah penduduk miskin dan jumlah pengeluaran pemerintah dapat membantu dalam mengurangi jumlah penduduk miskin.

B. Saran

Bertitik tolak dari uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dari hasil hipotesis penelitian ini serta kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis, maka untuk dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, maka saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Bagi lingkungan Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan ilmu dan referensi dalam memahami masalah-masalah pembangunan yang ada di Indonesia. Penelitian ini diharapkan pula agar dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dan diharapkan menambah variabel yang lebih banyak untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pemerintah sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang dalam upaya mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Dengan ini diharapkan pengeluaran pemerintah dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen untuk melakukan penanganan yang tepat terkait tingginya jumlah penduduk dan pengangguran yang berdampak kepada tingginya jumlah penduduk miskin. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengalokasikan pengeluaran pemerintah kepada sektor-sektor produktif yang dapat merangsang perekonomian, menambah sarana dan prasarana pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kegiatan pengembangan *skill* masyarakat.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai pengaruh jumlah penduduk, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan sehingga dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengatasi masalah pembangunan yang ada di Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

- Adioetomo, Sri Moetiningasih Setyo. *Pertumbuhan Penduduk dan Kesejahteraan Ekonomi*. Jakarta: Presentasi dalam Pentaloka BKKBN 2011.
- Al-Athasy, Mahmud Ahmad Sa'id. *Hikmah di Balik Kemiskinan*, Jakarta: Qisthi Press, 2013.
- Arif, Muhammad. *Filsafat Ekonomi Islam*, Medan: Buku Ajar, 2018.
- Arif, Nur Rianto Al. *Teori Makroekonomi Islam Konsep, Teori dan Analisis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Arsyad, Lincolin. *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: STIE YKPN, 1997.
- _____. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan*, Yogyakarta: BPFE, 1999.
- Depag, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Sukses Publising, 2012
- Harahap, Isnaini. *Ekonomi Pembangunan Pendekatan Transdisipliner*, Medan: Buku Ajar, 2019
- Ibnu Faris, *Mu'jam Maqayis al- Lughah*, Juz 4, Cet. Ke-1, Beirut, Dar al-Jail, 1420 H/1999 M.
- Kuncoro, Mudrajad. *Masalah, Kebijakan, dan Politik Ekonomika Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 1997.
- _____. *Dasar-Dasar Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Machali, Imam. *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta: MPI, 2017.
- Naf'an. *Ekonomi Makro Tinjauan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- PD, Mohd. Kurniawan. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Banyuwasin (Studi Kasus di Kecamatan Sungai Lilin)*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini, No. 01, Vol. 08, April 2017, Palembang, 2017.

- Prasetya, Ferry. *Kebijakan Publik: Pengeluaran Pemerintah*, (Modul, tidak diterbitkan)
- Pujoalwanto, Basuki. *Perekonomian Indonesia; Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Subri, Mulyadi. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*, Jakarta: ESIS, 2007
- _____. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sukirno, Sadono. *Makro Ekonomi Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*, Jakarta: Kencana, 2017.
- _____. *Makroekonomi: Teori Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Syahatah, Husen. *Ekonomi Rumah Tangga Muslim*, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Syauqi, Irfan, dkk. *Ekonomi Pembangunan Syariah Edisi Revisi. I* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Tambunan, Tulus. *Perekonomian Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Etika Dan Spiritualitas Bisnis: Tela'ah isu-isu Aktual dan Masa Depan Pendidikan Tinggi Ekonomi Islam*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016.
- Todaro dan Smith. *Pembangunan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2013.
- Trianto, Budi. *Riset Modeling*, Pekanbaru: Adh Dhuha Institute, 2016.

Jurnal/Karya Ilmiah

- Asrianti, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Belanja Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia". *Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2017.
- Astuti, Restu Ratri, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di

- Indonesia Tahun 2004-2012”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2015.
- Azizah, Elda Wahyu, Dkk. “Pengaruh Pendidikan, Pendapatan Perkapita dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur”. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol.2 jilid 1, 2018, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Jaelani, Aan, “Public Expenditure Management in Indonesia: Islamic Economic Review on State Budget 2017”, *Munich Personal RePeC Archive Paper* No. 77423, Maret 2017, Cirebon 2017.
- _____, “Fiscal policy in Indonesia: Analysis of state budget 2017 in Islamic economic perspective”. *MPRA Paper* No. 75445. Germany: University Library of Munich. 2016.
- Lestari, Riana Puji, “Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran dan PDRB Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Lampung dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2015”. *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Mahsunah, Durrotul, “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Timur”, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, Surabaya, 2017
- Mustamin, Siti Walida, “Pengaruh Variabel Ekonomi Makro Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, No. 01, Vol. 01, Maret 2017, Makassar, 2017.
- Seran, Sirilius, “Hubungan Pendidikan, Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan”. Dalam *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol.10, No. 2. Timor, 2017.
- Waruwu, Seri Jefry Adil, “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, Belanja Pemerintah, dan Investasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 1995-2014”. *Skripsi*, Fakultas Kejuruan dan Pendidikan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, 2016.
- Zaman, Khalid, Dkk, “Exploring the Link Between Poverty-Pollution-Population (3Ps) in Pakistan: Time Series Evidence”. *Journal of Economics And Sustainable Development*, No. 11&12, Vol.2, 2011, Department of Mangement Sciences, COMSATS Institute of Information Technology, Abottabad, Pakistan and Department of Management Sciences, Bahria University, Islambad, Pakistan, 2011.

Website

Prasetya, Bonivasius & Kristanto, David, “Pengaruh Jumlah Penduduk, IPM dan TPT terhadap kemiskinan di Indonesia”, Working paper, Oktober, 2017.
<https://www.researchgate.net> diakses pada senin 05 Agustus 2019 Pukul 09:50 WIB

<https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html#subjekViewTab1> diakses pada Selasa 8 Januari 2019 Pukul 17:41 WIB

<https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html> diakses pada Jumat 11 Januari 2019 Pukul 18:24 WIB

<https://shariaeconomics.wordpress.com/tag/pemikiran-ekonomi-ibnu-khaldun/> diakses pada Jum'at 1 Februari 2019 Pukul 17:23 WIB

<https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-ordinary-least-squares-ols/116519>, diakses pada Minggu 14 April 2019, pukul 00:37 WIB

www.worldbank.org diakses pada Selasa 8 Januari 2019 21:59 WIB



LAMPIRAN - LAMPIRAN



Lampiran 1: Kemiskinan, Jumlah Penduduk, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Tahun 1990-2017

Tahun	Jumlah Penduduk	Pengangguran	Pengeluaran Pemerintah	Kemiskinan
	(Jiwa)	(Jiwa)	(Rp)	(Jiwa)
1990	181,436,821	1,911,800	18,649,100,000,000	27,740,000
1991	184,615,979	1,992,115	20,784,600,000,000	26,300,000
1992	187,766,086	2,136,021	24,731,300,000,000	25,900,000
1993	190,879,523	2,199,210	29,756,700,000,000	23,700,000
1994	193,945,272	3,636,932	31,014,000,000,000	22,500,000
1995	196,957,849	3,800,000	35,584,200,000,000	32,600,000
1996	199,914,831	4,275,414	40,299,200,000,000	34,010,000
1997	202,826,465	4,183,971	42,952,000,000,000	38,700,000
1998	205,715,544	5,045,260	54,415,900,000,000	49,500,000
1999	208,612,556	6,030,319	72,631,300,000,000	47,970,000
2000	211,540,429	5,813,231	90,779,700,000,000	38,740,000
2001	214,506,502	8,005,031	113,416,100,000,000	37,870,000
2002	217,508,059	9,132,104	132,218,800,000,000	38,390,000
2003	220,545,214	9,939,301	163,701,400,000,000	37,340,000
2004	223,614,649	10,251,351	191,055,626,000,000	36,150,000
2005	226,712,730	10,854,254	224,980,540,000,000	35,100,000
2006	229,838,202	11,104,693	288,079,870,000,000	39,300,000
2007	232,989,141	10,547,917	329,760,103,000,000	37,170,000
2008	236,159,276	9,427,590	416,866,669,000,000	34,960,000
2009	239,340,478	9,258,964	537,588,828,000,000	32,530,000
2010	242,524,123	8,592,490	618,177,992,000,000	31,020,000
2011	245,707,511	8,379,882	709,450,776,000,000	30,020,000
2012	248,883,232	7,757,831	796,848,275,918,420	29,130,000
2013	252,032,263	7,240,897	908,574,301,386,380	28,070,000
2014	255,131,116	7,147,069	996,197,442,903,830	28,280,000
2015	258,162,113	7,454,767	1,123,749,877,140,690	28,590,000
2016	261,115,456	7,024,172	1,181,613,139,392,340	28,010,000
2017	263,991,379	7,005,262	1,234,554,340,604,290	27,770,000
2018	267,663,435	6,871,264	1,332,534,472,426,250	25,950,000

Sumber: BPS (Badan Pusat Statistik) dan World Bank, 2019

Lampiran 2: Hasil Pengolahan Data Uji Regresi Linear Berganda

1. Uji hipotesis

Dependent Variable: LOG(KM)

Method: Least Squares

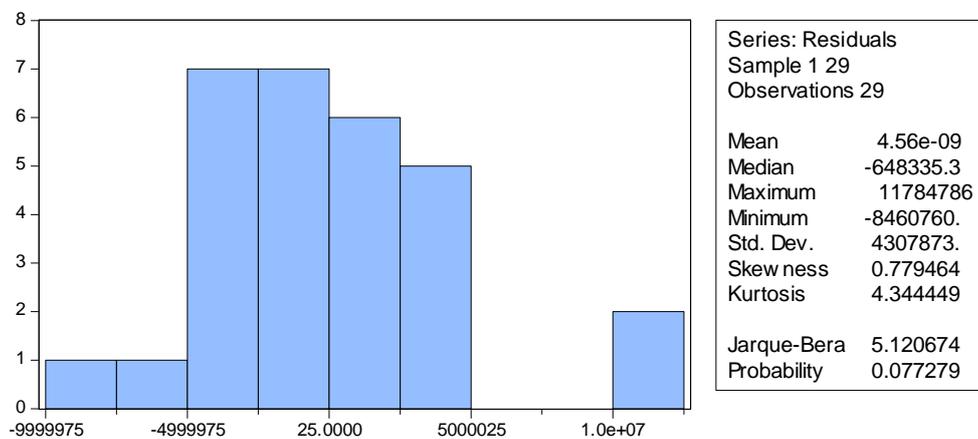
Date: 11/17/19 Time: 00:00

Sample: 1 29

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-88.52110	37.53972	-2.358065	0.0265
LOG(JP)	6.560468	2.268803	2.891599	0.0078
PG	6.56E-08	1.25E-08	5.256717	0.0000
LOG(PP)	-0.631592	0.186996	-3.377568	0.0024
R-squared	0.571740	Mean dependent var		17.28943
Adjusted R-squared	0.520349	S.D. dependent var		0.195402
S.E. of regression	0.135329	Akaike info criterion		-1.034774
Sum squared resid	0.457849	Schwarz criterion		-0.846181
Log likelihood	19.00422	Hannan-Quinn criter.		-0.975709
F-statistic	11.12525	Durbin-Watson stat		0.761485
Prob(F-statistic)	0.000079			

2. Uji Normalitas



3. Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors

Date: 11/16/19 Time: 22:21

Sample: 1 29

Included observations: 28

Coefficient	Uncentered	Centered
-------------	------------	----------

Variable	Variance	VIF	VIF
C	2.76E+14	524.7013	NA
D(JP)	30.09915	544.2166	1.329685
D(PG)	1.505458	1.473772	1.383944
D(PP)	4.98E-16	3.627485	1.540663

4. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.922454	Prob. F(2,22)	0.4124
Obs*R-squared	2.166392	Prob. Chi-Square(2)	0.3385

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 11/16/19 Time: 22:26

Sample: 2 29

Included observations: 28

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4503277.	18137875	0.248280	0.8062
D(JP)	-1.388499	5.933288	-0.234018	0.8171
D(PG)	-0.575353	1.472636	-0.390696	0.6998
D(PP)	-2.62E-09	2.28E-08	-0.114831	0.9096
RESID(-1)	0.146829	0.216951	0.676785	0.5056
RESID(-2)	-0.280236	0.242752	-1.154413	0.2607
R-squared	0.077371	Mean dependent var		2.69E-09
Adjusted R-squared	-0.132317	S.D. dependent var		3617499.
S.E. of regression	3849395.	Akaike info criterion		33.35214
Sum squared resid	3.26E+14	Schwarz criterion		33.63761
Log likelihood	-460.9300	Hannan-Quinn criter.		33.43941
F-statistic	0.368982	Durbin-Watson stat		1.895899
Prob(F-statistic)	0.864335			

5. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.186653	Prob. F(9,18)	0.3601
Obs*R-squared	10.42670	Prob. Chi-Square(9)	0.3171
Scaled explained SS	18.79409	Prob. Chi-Square(9)	0.0270

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 11/16/19 Time: 22:28
 Sample: 2 29
 Included observations: 28

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-7.37E+14	1.98E+15	-0.371924	0.7143
D(JP)	7.34E+08	1.33E+09	0.550369	0.5888
(D(JP))^2	-157.7764	225.1415	-0.700788	0.4924
(D(JP))*(D(PG))	-19.17261	136.0076	-0.140967	0.8895
(D(JP))*(D(PP))	3.43E-06	2.19E-06	1.570188	0.1338
D(PG)	32305463	4.16E+08	0.077750	0.9389
(D(PG))^2	1.611114	12.11582	0.132976	0.8957
(D(PG))*(D(PP))	4.04E-07	4.75E-07	0.849524	0.4067
D(PP)	-11.08778	6.713073	-1.651670	0.1159
(D(PP))^2	2.14E-15	4.41E-15	0.485226	0.6334
R-squared	0.372382	Mean dependent var		1.26E+13
Adjusted R-squared	0.058573	S.D. dependent var		2.85E+13
S.E. of regression	2.76E+13	Akaike info criterion		65.00940
Sum squared resid	1.37E+28	Schwarz criterion		65.48519
Log likelihood	-900.1316	Hannan-Quinn criter.		65.15485
F-statistic	1.186653	Durbin-Watson stat		2.668280
Prob(F-statistic)	0.360119			

6. Uji Linearitas

Ramsey RESET Test
 Equation: UNTITLED
 Specification: LOG(KM) C LOG(JP) LOG(PG) LOG(PP)
 Omitted Variables: Squares of fitted values

	Value	df	Probability
t-statistic	0.250742	24	0.8041
F-statistic	0.062872	(1, 24)	0.8041
Likelihood ratio	0.075870	1	0.7830

F-test summary:

	Sum of Sq.	df	Mean Squares
Test SSR	0.001001	1	0.001001
Restricted SSR	0.383131	25	0.015325
Unrestricted SSR	0.382130	24	0.015922
Unrestricted SSR	0.382130	24	0.015922

LR test summary:

	Value	df
Restricted LogL	21.58756	25
Unrestricted LogL	21.62549	24

Unrestricted Test Equation:
 Dependent Variable: LOG(KM)
 Method: Least Squares

Date: 11/16/19 Time: 22:17

Sample: 1 29

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	708.6774	3018.959	0.234742	0.8164
LOG(JP)	-47.06088	202.9436	-0.231891	0.8186
LOG(PG)	-5.010982	21.60199	-0.231969	0.8185
LOG(PP)	5.358861	23.10624	0.231923	0.8186
FITTED^2	0.386352	1.540841	0.250741	0.8041
R-squared	0.642565	Mean dependent var		17.28943
Adjusted R-squared	0.582993	S.D. dependent var		0.195402
S.E. of regression	0.126183	Akaike info criterion		-1.146586
Sum squared resid	0.382130	Schwarz criterion		-0.910845
Log likelihood	21.62549	Hannan-Quinn criter.		-1.072755
F-statistic	10.78628	Durbin-Watson stat		0.935608
Prob(F-statistic)	0.000038			

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : SUNDARI RAHMA SARI PUTRI
2. NIM : 51153122
3. Tpt/Tgl Lahir : Medan, 18 November 1997
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : JL. Rawa Cangkuk No. 40 Medan
6. Email : sundarisariputri@gmail.com

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan Sekolah Dasar Negeri 060912 Medan, Kecamatan Medan Denai, Berijazah Tahun 2009
2. Tamatan SMPTN 23 Medan, Kec. Medan Denai, Berijazah Tahun 2012
3. Tamatan SMK-BM YAPIM Medan, Kec. Medan Kota, Berijazah Tahun 2015

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. Kader Kelompok Studi Ekonomi Islam Universal Islamic Economic UIN SU 2015 Periode 2016 – 2017.
2. Kader Dewan Eksekutif Mahasiswa FEBI UIN SU 2015 Periode 2016 – 2017.

IV. RIWAYAT PRESTASI

1. Delegasi Olimpiade Ekonomi Islam pada Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS) Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Tahun 2016 di Yogyakarta

2. Juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam pada Temu Ilmiah Regional (TEMILREG) FoSSEI SUMBAGUT tahun 2017 yang diselenggarakan di Banda Aceh